

**IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA DAN *ASIAN FOREST
COOPERATION ORGANIZATION (AFOCO)* DALAM
MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* TAHUN
2016-2019**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam
Bidang Hubungan Internasional**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Dewi Puspita

NIM. I02216005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

AGUSTUS 2020

**PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Dewi Puspita
NIM : 102216005
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Implementasi Kerjasama Indonesia dan *Asian Forest
Cooperation Organization (AFoCO)* dalam Mewujudkan
Sustainable Development Goals tahun 2016-2019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya berhasil menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 28 Juli 2020

Yang menyatakan

MATERAI
TIMPEL
BAEF981061653
6000
Rp. 6000
Dewi Puspita
NIM.102216005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dewi Puspita

Nim : I02216005

Program Studi : Hubungan International

Yang berjudul **“Implementasi Kerjasama Indonesia dan Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Tahun 2016-2019”** saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan International.

Surabaya, 28 Juli 2020
Pembimbing



Ridha Amaliyah, S. IP, MBA
NIP: 201409001

PENGESAHAN

Skripsi oleh Dewi Puspita dengan judul **“Implementasi Kerjasama Indonesia dan Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Tahun 2016-2019”** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim penguji Skripsi pada tanggal 07 Agustus 2020

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Ridha Amaliyah S.IP., MBA
NIP. 201409001

Penguji II



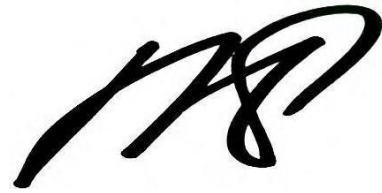
Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A.
NIP. 198408232015031002

Penguji III



Rizki Rahmadini N, S.Hub.Int., M.A.
NIP. 199003252018012001

Penguji IV



M. Fathoni Hakim, M.Si
NIP. 198401052011011008

Surabaya, 07 Agustus 2020
Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Dekan



Prof. Akh. Muzakki, Grad. Dip. SEA, M.Ag, M.Phil, Ph.D.
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEWI PUSPITA
NIM : I02216005
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik/Hubungan Internasional
E-mail address : dewi.puspita11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA DAN ASIAN FOREST COOPERATION ORGANIZATION (AFOCO) DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS TAHUN 2016-2019

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juli 2020

Penulis


Dewi Puspita

ABSTRACT

Dewi Puspita, 2020, *"Implementation of Indonesia and the Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) Cooperation in Accomplishing the Sustainable Development Goals 2016-2019"*, Undergraduate Thesis of International Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Keywords: implementation, cooperation, Indonesia, AFOCO, sustainable forest

This study aims to examine the implementation of Indonesia and Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) cooperation in accomplishing Sustainable Development Goals in 2016-2019. Indonesia is a country with the 3rd largest deforestation in the world. The Indonesian government continues to promote deforestation and greenhouse gas emissions reduction. The method used is descriptive qualitative to explain in detail about the background as well as implementation of the cooperation programs. In this study, data collection techniques used are interview and documentation. To describe this phenomenon, this study uses the concept of international cooperation and Sustainable Development Goals. The results find that the implementation carried out by the cooperation is 1) developing capacity to support sustainable management of natural resources; 2) facilitating participatory community-based forest management planning; 3) capacity building to improve the assessment of forest resources and increase the involvement of local communities.

ABSTRAK

Dewi Puspita, 2020, *"Implementasi Kerjasama Indonesia dan Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) 2016-2019"*, Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci : implementasi, kerjasama, Indonesia, AFOCO, hutan berkelanjutan
 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan dari kerjasama Indonesia dengan Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) dalam mewujudkan Sustainable Development Goals pada tahun 2016-2019. Indonesia adalah negara dengan deforestasi terbesar ke-3 di dunia. Pemerintah Indonesia terus menyerukan pengurangan deforestasi dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif guna menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang hingga implementasi program kerjasama. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan dokumentasi. Untuk menggambarkan fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan konsep kerjasama internasional dan SDG. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi kerjasama Indonesia-AFoCO adalah: 1) mengembangkan kapasitas untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; 2) memfasilitasi perencanaan partisipatif pengelolaan hutan berbasis masyarakat; 3) pengembangan kapasitas dalam meningkatkan penilaian sumber daya hutan dan meningkatkan keterlibatan komunitas lokal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat akademis	10
2. Manfaat praktis.....	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Argumentasi Utama	17
G. Sistematika Penyajian Skripsi	17
BAB II : LANDASAN KONSEPTUAL	19
A. Kerjasama Internasional.....	19
B. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	22
C. Definisi Konseptual.....	29
a. Implementasi	29
b. <i>Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)</i>	31
BAB III : METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Waktu dan Tempat Penelitian	34
C. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisa	34
D. Tahapan Penelitian	35
1. Tahap persiapan atau pendahuluan	35
2. Tahap pelaksanaan	35
3. Tahap analisis data	35
4. Tahap laporan.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	39
BAB IV : PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN DATA.....	42
A. Profil Hutan Indonesia	42
B. Fungsi Kawasan Hutan	45
C. Deforestasi Hutan di Indonesia	47
1. Industri Kelapa Sawit.....	48

2. <i>Illegal Logging</i>	49
3. Pertambangan	50
4. Urbanisasi	51
D. Kerjasama Bidang Kehutanan Indonesia di Level Internasional	52
E. <i>Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)</i>	58
1. Profil	58
2. <i>Program and Project</i>	62
F. Implementasi Kerjasama Indonesia – <i>AFoCO</i> di Indonesia	66
1. Hutan Desa Paru Sijunjung, Sumatera Barat	68
2. Kemitraan Kehutanan Cempaka Batutegi, Lampung	71
3. Hutan Kemasyarakatan Tuar Tana Sikka, NTT	72
G. Kerjasama Internasional Indonesia dan <i>AFoCO</i>	74
BAB V: PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Persoalan lingkungan saat ini tengah menjadi isu yang sangat diperhatikan, melihat kondisi lingkungan hijau yang semakin terkikis oleh zaman tanpa diimbangi dengan penghijauan kembali yang konsisten. Isu lingkungan terkait perubahan iklim gempar digemakan sejak tahun 1990-an. Hutan adalah tempat bagi sekitar 80 persen dari keanekaragaman hayati darat yang tersisa di dunia. Hutan ikut menjaga kualitas tanah agar mengurangi risiko bencana alam seperti banjir¹.

Meningkatkan pendanaan untuk konservasi dan perlindungan hutan adalah prioritas terutama pada saat sistem alam berada di bawah tekanan demografis, ekonomi dan iklim. Penyebab masalah kehutanan salah satunya ialah deforestasi. Deforestasi sendiri merupakan pengurangan kawasan hutan secara ilegal sebagai apapun bentuknya tidak atas dasar hukum yang berlaku². Di seluruh dunia, sekitar 2 milyar hektar lanskap hutan yang hilang atau terdegradasi dapat dipulihkan dan direhabilitasi, mengembalikan lanskap dan masyarakat ke potensi produktif yang sehat³. Meskipun laju deforestasi telah melambat di beberapa wilayah, dunia masih kehilangan

¹ “Menanam Pohon untuk Mengatasi Pemanasan Global,” Knowledge Center Perubahan Iklim KLHK, Diakses 3 Januari 2020,
<http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/aksi/mitigasi/implementasi/330-menanam-pohon-untuk-mengatasi-pemanasan-global>

² “Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018,” Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Diakses 15 Juli 2020

³ Carnemark, C. “*Forests and the Environment*, 2, “. World Bank, 2013

sekitar 14,5 juta hektar hutan setiap tahun. Perubahan iklim yang terjadi akan membuat daerah-daerah yang beriklim tropis mengalami dampak yang sangat buruk. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki dua musim yakni musim hujan dan musim panas. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang dijuluki dengan hutan tropis terluas setelah Brazil⁴.

Perluasan lahan perkebunan sawit mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan serta pengalihan lahan hutan untuk permukiman menjadi pemicu terjadinya deforestasi. Pengukuran deforestasi Indonesia sudah dilakukan sejak 1990⁵. Pada tahun 1996-2000 deforestasi tertinggi Indonesia tercatat capai 3,51 juta hektar. Dengan lahan kawasan hutan 2,83 juta hektar dan lahan non kawasan hutan 0,68 hektar, Indonesia menempati posisi ketiga setelah Brazil dan Kongo pada tahun 2018 menurut data *World Resources Institute (WRI)*. Seringnya konflik atas perizinan pengelolaan kawasan hutan, serta ancaman kebakaran hutan dan meningkatnya permukiman masyarakat merupakan penyebab banyaknya pengalihan lahan menjadi faktor pendorong terjadinya deforestasi⁶.

⁴ Nancy Harris, dkk, "Lanskap Hutan Utuh Penting untuk Perubahan Iklim. Inilah Tiga Alasannya," WRI Indonesia, 2017, Diakses 3 Januari 2020, <https://wri-indonesia.org/id/blog/lanskap-hutan-utuh-penting-untuk-perubahan-iklim-inilah-tiga-alasannya>

⁵ Mikaela Weisse, dkk, "Dunia Kehilangan Hutan Primer Seluas Belgia di Tahun 2018," WRI Indonesia, 2019, Diakses 3 Januari 2020, <https://wri-indonesia.org/id/blog/dunia-kehilangan-hutan-primer-seluas-belgia-di-tahun-2018>

⁶ Ibid, "Deforestasi di Indonesia Menurut Jenis Lahan (1990-2017)"

Kebakaran hutan yang hebat telah merugikan negara yang mana dampaknya dirasakan hingga ke negeri tetangga⁷.

Sebuah keadaan yang mengancam deforestasi diusahakan oleh pemerintah untuk dikurangi kejadiannya. Hal tersebut terbilang sulit karena keadaan Indonesia dimana penduduknya hampir 300 juta hektar karena itu upaya yang dilakukan sedini mungkin ialah kesadaran masyarakat. Dengan upaya pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga memberlakukan beberapa kebijakan seperti rehabilitasi hutan, alokasi kawasan hutan pengendalian kerusakan gambut, pengendalian perubahan iklim, serta pengelolaan hutan lestari memberikan penambahan dampak pada penurunan deforestasi⁸.

Di Indonesia, hutan hujan tropis adalah hutan yang paling luas hal tersebut terlihat bagaimana posisi negara di kawasan Asia Tenggara yang banyak memiliki kawasan hijau dan memperoleh lebih baik berbagai flora dan fauna. Tidak mengungkiri jika kawasan Asia Tenggara banyak dilirik untuk kerjasama oleh berbagai negara di dunia salah satunya ialah negara

⁷ Viva Budy Kusnandar, "Deforestasi di Indonesia Menurut Jenis Lahan (1990-2017)", Databoks, 2019, Diakses 3 Januari 2019, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/20/inilah-deforestasi-di-indonesia-periode-1990-2017>

⁸ Forqan, B. N. *Hukum Lingkungan , Pemanasan Global, Skema Global Dan Implikasinya Bagi Indonesia*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum.

Korea Selatan yang notabenenya merupakan salah satu negara yang berhasil merubah negaranya menjadi negara *eco friendly*⁹.

Korea Selatan mempunyai jejak yang baik dalam mengolah kehutanannya. Terbukti dunia mengakui Korea Selatan merupakan salah satu negara yang telah sukses dalam menanam tanaman pada area yang tergradasi seluas 2,1 juta ha dalam kurun waktu dari 1962-2018. Keberhasilan Korea Selatan tersebut tidak lepas dari Presiden Mr. Park Chung Hee kala itu yang menjadikan beliau pelopor proses reforestasi hutan di Korea Selatan. Hal tersebut terbukti dengan beliau yang sedikit agak memaksa jika setiap tanggal 5 April yang ditetapkan sebagai hari tanam nasional. Murid bersama orang tua serta guru harus pergi ke gunung untuk menanam, bahkan beliau tidak segan untuk turun langsung. Kesuksesan ini juga didorong adanya masyarakat mandiri serta kerjasama dalam masyarakat tersebut. Dengan partisipasi dan kerjasama masyarakat Korea Selatan tidak terlepas adanya keberhasilan Program Saemaul Undong atau gerakan membangun desa di Korea Selatan, satu program yang dicetuskan oleh Presiden Chung Hee¹⁰.

Korea Selatan sebagai salah satu negara industri yang juga menyumbang emisi gas rumah kaca, menyadari pentingnya mengatasi permasalahan ini. Oleh karena itu Korea Selatan mulai merubah paradigma negaranya. Hal ini dimulai sejak Presiden Korea Selatan, Lee

⁹ “Anugerah dari Hutan Indonesia,” INDONESIA.GO.ID, Redaksi. T, 2019, Diakses 2 Januari 2020, <https://www.indonesia.go.id/ragam/keanekaragaman-hayati/ekonomi/anugerah-dari-hutan-indonesia>

¹⁰ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Rahasia Dibalik Kesuksesan Restorasi Hutan di Korea Selatan”, 2018, https://www.menlhk.go.id/site/single_post/366

Myung Bak mulai mendeklarasikan *Low Carbon, Green Growth* sebagai visi nasional Korea pada tahun 2008, membuatnya disebut sebagai *Heroes of the Environment*.¹¹

Low Carbon Green Growth sendiri memiliki tiga tujuan utama yaitu terkait masalah perubahan iklim dan kemandirian energi negara, menciptakan mesin pertumbuhan baru, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tiga tujuan utama tersebut dituangkan dalam 10 arah kebijakan diantaranya pengurangan emisi gas, pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, peningkatan kemandirian energi, pengembangan teknologi hijau dan penciptaan mesin pertumbuhan baru, penghijauan industri yang ada, pemeliharaan industri hijau, kemajuan infrastruktur industri, meletakkan dasar kelembagaan ekonomi hijau, menciptakan tanah air hijau dan sistem dan menjadi panutan komunitas internasional sebagai pemimpin dalam pertumbuhan hijau¹².

Untuk menindaklanjuti kebijakan *Low Carbon, Green Growth* sebagai visi Nasional Korea Selatan, Pemerintah Korea Selatan mencetuskan organisasi yang bernama *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)*. Menyadari akan pentingnya hutan bagi kehidupan Korea Selatan sadar bila untuk pengurangan gas emisi rumah kaca tersebut tidak dapat dilakukan sendiri. Membutuhkan kerjasama antar negara- negara yang memiliki kemauan kuat dalam ikut bertanggung jawab.

¹¹ Agustian, W. "Rahasia Seoul yang Sukses Menjadi Kota Hijau". Okezone.com. 2013

¹² Bappenas, *Country Natural Resources and Environment Assessment*, 2007

Pembahasan kerjasama kehutanan antara negara-negara ASEAN dengan Korea Selatan juga telah dimulai sejak dilaksanakannya Pertemuan Puncak ASEAN-Korea Selatan di Jeju, Korea pada bulan Juni 2009. Salah satu dari hasil pertemuan tersebut adalah disampaikannya usulan dari Presiden Republik Korea, Lee Myung-bak, untuk membentuk *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)* sebagai organisasi yang akan menangani kerjasama kehutanan antara negara-negara ASEAN dengan Republik Korea. Serangkaian pertemuan *ASEAN Senior Officer on Forestry (ASOF)* dan *ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF)* pun telah dilakukan untuk membahas pembentukan *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)*¹³.

Penandatanganan naskah perjanjian AFoCO pada acara *ASEAN-Republic of Korea Commemorative Summit* yang diselenggarakan pada tanggal 1-2 Agustus 2016 di Pulau Jeju Korea Selatan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menuturkan Indonesia selaku negara pemilik hutan tropis terbesar ke-3 di dunia sudah sewajarnya mengambil peran utama dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung terwujudnya pengelolaan hutan lestari¹⁴. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, atas nama Pemerintah Republik Indonesia

¹³ Tuti "Direktur Eksekutif AFoCo Berkunjung Ke Kampus Badan Litbang dan Inovasi," Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi KLHK, 2016, Diakses 3 Januari 2020, <https://www.fordamof.org/index.php/berita/post/2748>

¹⁴ Murdaningsih, D. *Indonesia Tandatangani Kerja Sama Kehutanan Tingkat Asia*. REPUBLIKA.CO.ID. 2016, diakses di (<https://nasional.republika.co.id/berita/obb407368/indonesia-tandatangani-kerja-sama-kehutanan-tingkat-asia>)

menegaskan komitmen untuk kerjasama di tingkat Asia dengan menandatangani perjanjian tersebut.

Indonesia sebagai negara yang memiliki kawasan hutan terbesar di Asia menegaskan komitmen untuk kerjasama bidang kehutanan di tingkat Asia dengan menandatangani perjanjian pendirian *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)*. Perjanjian tersebut mencakup kerjasama tata kelola hutan yang lestari, perubahan iklim, dan pendanaan kegiatan-kegiatan di bidang Kehutanan¹⁵.

Delegasi Indonesia diketuai Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Henry Bastaman dalam pertemuan Special Session of the Governing Council of the Agreement ASEAN-Republic of Korea Cooperation. Organisasi antarpemerintahan ini beranggotakan 13 negara anggota ASEAN (kecuali Malaysia dan Singapura), Bhutan, Mongolia, Kazakstan, Korea Selatan dan Timor Leste. Saat ini tercatat Korea Selatan dan Timor Leste yang telah menandatangani perjanjian AFoCO, selanjutnya Bhutan akan menandatangani pada 3 Agustus 2016 setelah Indonesia.

Dalam mendukung terwujudnya sistem penghijauan yang adil bagi masyarakat dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan suatu terobosan yakni *Sustainable Development Goals* yang mana memiliki 17 Tujuan yang akan dicapai hingga tahun 2030.

¹⁵ “Tegaskan Komitmen Kerjasama Kehutanan Di Tingkat Asia, Menteri LHK Tandatangani Perjanjian AFoCO,” PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016, Diakses 3 Januari 2020, http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/366

Dalam menerapkan lingkungan yang ramah akan kehutanan pun sudah diatur dalam *SDGs* Indonesia bekerjasama dengan Korea Selatan berharap bahwa untuk mendukung visi dari *AFoCO* tersebut dibutuhkan suatu konsep yang akan menjadi acuan dasar dalam penerapannya.

Melalui konsep *Sustainable Development Goals* ini yakni adalah sejauh mana praktik kehutanan berkelanjutan menyeimbangkan kebutuhan lingkungan, satwa liar, dan komunitas hutan — mendukung pendapatan yang layak sambil melestarikan hutan kita untuk generasi mendatang. Ada banyak langkah praktis yang dapat dilakukan oleh komunitas atau bisnis untuk melindungi kesehatan dan umur panjang hutan sambil tetap mendapatkan keuntungan dari produksi dan penjualan kayu dan hasil hutan lainnya. Indonesia berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan Dengan begitu kerjasama ini mendapatkan hasil yang optimal untuk mengembangkan kawasan yang ramah lingkungan juga aman bagi kawasan perhutanan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan pertanyaan permasalahan dalam skripsi ini yakni: Bagaimana implementasi kerjasama Indonesia dan *AFoCO* dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* tahun 2016-2019?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi fokus peneliti, tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan implementasi kerjasama Indonesia dan *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)* dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* tahun 2016-2019.

D. MANFAAT PENELITIAN

Melalui penelitian ini, peneliti sangat berharap dapat memberikan kontribusi dalam bidang akademis maupun praktis :

1. Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Hubungan Internasional di era kontemporer ini, khususnya dalam konsentrasi mewujudkan hutan yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber rujukan atau referensi kedepannya dalam hal penelitian-penelitian yang sejenis juga menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini juga menjadi sumber wawasan tambahan bagi peneliti dalam memahami dan mengembangkan ilmu Hubungan Internasional kontemporer terutama dalam mengkaji upaya Kerjasama Indonesia dan *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)*.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi salah satu sumber masukan bagi beberapa pihak terkait dan dapat memberikan saran bagi pemerintah untuk membentuk suatu kebijakan :

- a. Dapat mengetahui Implementasi Kerjasama Indonesia dan *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)* dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals*
- b. Sebagai salah satu tambahan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat luas untuk lebih mengetahui fenomena Penghijauan Kembali Melalui *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)*

E. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang berjudul “Implementasi Kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* melalui *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)*” belum pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai pembanding dan pelengkap, peneliti menambahkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi kajian literatur dan kepustakaan peneliti:

1. Penelitian oleh Nilla Oktaverina dalam skripsi yang berjudul “Tujuan Korea Selatan Mengusulkan Pembentukan *Asean Korea Forest Cooperation*”¹⁶ tahun 2016. Penelitian ini menjelaskan tentang apa

¹⁶ Oktaverian, N. . TUJUAN KOREA SELATAN MENGUSULKAN PEMBENTUKAN ASEAN KOREA FOREST COOPERATION. 2016 1.diakses di

tujuan Korea Selatan membentuk organisasi kehutanan di wilayah ASEAN. Indikator penulis dalam membuktikan tujuan Korea Selatan adalah berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya dalam nasional interest Korea Selatan di kawasan ASEAN. Persamaan skripsi dengan dengan yang ditulis penulis ialah bagaimana menjelaskan tujuan organisasi yang dibentuk untuk pembenahan kawasan hutan dan apa program yang diberikan. Dengan perbedaannya ialah penulisan skripsi ini lebih menjurus kepada bagaimana implementasi yang terlihat dari mewujudkan *Sustainable Development Goals*.

2. Penelitian oleh Ari Putra dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan *Green Growth* Korea Selatan” tahun 2014¹⁷. Penelitian ini menjelaskan tentang sejauh mana kebijakan *Green Growth* berdampak pada kawasan hijau di negara Korea Selatan juga sejauh mana tekad pemerintah dalam mengembangkannya. Dijelaskan pula melalui kebijakan ini, Korea Selatan memiliki keinginan dalam mencari mesin pertumbuhan baru dalam rangka meningkatkan kemandirian negara dan mitigasi perubahan iklim. Hal ini mengingat bahwa Korea Selatan adalah negara dengan intensitas konsumsi energi yang tinggi dan salah satu negara dengan dengan peningkatan emisi gas tertinggi di dunia. Persamaan penelelitian tersebut dengan yang ditulis peneliti ialah sama-sama menggunakan kata kunci implementasi yang mana

(<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/78836/NILA%20OKTAVERINA.pdf?sequence=1>)

¹⁷ Putra, A. “Implementasi Kebijakan *Green Growth* Korea Selatan”. 1. 2014. Diakses di (<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/3108/3010>)

menerapkan suatu kebijakan suatu negara atau kelompok. Namun perbedaannya ialah dalam skripsi tersebut menerapkan apa yang tercapai dari kebijakan Green Growth, sedangkan penelitian yang ditulis penulis ini menjelaskan penerapan apa saja yang ada di Indonesia oleh organisasi AFoCO.

3. Penelitian oleh Suci Fitri Febrianti dalam skripsi yang berjudul “Kebijakan *Low Carbon Green Growth* Di Korea Selatan: Sebuah Tinjauan Politik Hijau, Tahun 2018¹⁸. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa, permasalahan lingkungan yang terjadi negara Korea Selatan perubahan iklim dan populasi manusia yang terus meningkat. Oleh karena itu sangat perlu adanya upaya penanggulangan bersama oleh Negara-negara di dunia dalam menghadapi masalah tersebut. *Green Growth* sebenarnya mirip dengan pembangunan berkelanjutan, dimana bertujuan untuk mendemonstrasikan bahwa perlindungan lingkungan dengan tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Namun, sedikit berbeda dengan pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan hijau langsung berfokus pada masalah pertumbuhan ekonomi. Persamaan dengan penulisan kali ini ialah sama-sama menunjukkan eksistensi adanya penghijuan kembali, dan perbedaan ialah skripsi tersebut menjelaskan bagaimana kebijakan *Low Carbon Green Growth*, namun pada penelitian ini lebih

¹⁸ Febrianti, S, F. “Kebijakan Low Carbon Green Growth di Korea Selatan : Sebuah Tinjauan Politik Hijau”. 2018.1. diakses di (<https://eprints.umm.ac.id/43132/1/pendahuluan.pdf>)

menjelaskan apa saja program dari organisasi yang dibentuk Korea Selatan.

4. Penelitian oleh Akhmad Viko Zakhary Santosa dalam jurnal yang berjudul “*Role of ROK Government in the ‘Green New Deal’ Policy*”, tahun 2011¹⁹. Penelitian ini menjelaskan tentang proses penetapan agenda kebijakan dalam pengembangan kebijakan Pertumbuhan Hijau di Korea. Diamati bahwa pemerintah baru memainkan peran utama dalam keseluruhan proses, dilihat dari peningkatan drastis dalam upaya membangkitkan opini publik oleh pemerintahan Lee Myung Bak. Hijau dalam Pertumbuhan Hijau melambangkan perlindungan lingkungan, sedangkan pertumbuhan adalah terkait dengan pembangunan ekonomi, sementara ini mungkin tampak sebagai visi yang secara langsung berlawanan dideklarasikan sebagai visi kebijakan Korea yang akan menyatukan kebijakan dari berbagai tindakan. Persamaan keduanya ialah sama-sama menjelaskan penghijauan yang menjadikan semua elemen sebagai peran utama tak terkecuali untuk menjaga kawasan hijau. Dan perbedaannya adalah penelitian tersebut bahwa bagaimana pemerintah mengelola kebijakan dengan menjadikan dasar kebijakan atas penghijauan. Sedangkan skripsi ini menjelaskan bagaimana penerapan penghijauan kembali melalui program-program yang dicetuskan.

¹⁹ Santosa, A. V. Role of ROK Government in the ‘Green. 1. 2011. diakses di (https://kohviko.files.wordpress.com/2011/12/role-of-rok-government-in-the-green-new-deal-policy.pdf)

5. Penelitian oleh Sholekha Prabawati dalam skripsi yang berjudul “Peranan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Wonogiri)²⁰, Tahun 2016. Penelitian menjelaskan bagaimana hukum untuk pelaku illegal logging yang mana pada zaman sekarang sedang marak terjadi. Dengan hukum yang berlaku setidaknya dapat membuat jera bagi para pelanggar. Hukum atas kerusakan hutan sangat dibutuhkan agar dapat meminimalisir adanya bencana suatu hari nanti. Adapun persamaan peneliti tersebut dengan skripsi ini ialah dapat sama-sama menjelaskan jika illegal logging adalah suatu perbuatan yang melanggar tatanan kehutanan, dan perbedaannya adalah skripsi ini lebih membahas implementasi dari kerjasama suatu negara dengan organisasi pemerintahan, sedangkan penelitian tersebut lebih fokus pada adanya hukum bagi pelanggar yang merusak ekosistem hutan.
6. Penelitian oleh Rino Adwat dalam skripsi yang berjudul “Pengelolaan Hutan Konservasi Desa Bagi Resistensi Masyarakat Desa Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong (Studi Kasus: Desa Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu), Tahun 2016²¹. Penelitian tersebut menjelaskan pentingnya pendekatan alternatif berupa pendekatan

²⁰ Prabawati, S. *Peranan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Wonogiri*, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016

²¹ Adwat, R. *Pengelolaan Hutan Konservasi Desa Bagi Resistensi Masyarakat Desa Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong (Studi Kasus: Desa Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu*, Universitas Bengkulu, 2016

pembangunan yang diawali oleh proses pemberdayaan masyarakat local. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha untuk memelihara atau dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan sebaik baiknya. Usaha melestarikan lingkungan dari pengaruh pembangunan diberbagai bidang adalah salah satu usaha yang perlu dijalankan. Pengelolaan lingkungan yang baik dapat mencegah kerusakan lingkungan sebagai akibat pembangunan. Tujuan pengelolaan lingkungan terutama untuk mencegah kemunduran populasi sumberdaya alam yang dikelola dan sumberdaya alam lain yang ada disekitarnya. Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi tersebut ialah sama membahas perlunya tindakan masyarakat untuk ikut andil dalam kelestarian hutan juga pemanfaatannya, perbedaannya ialah di skripsi ini menjelaskan beberapa implementasi dari berbagai daerah di Indonesia, sedangkan penelitian tersebut lebih fokus pada studi.

7. Penelitian oleh Kiki Ayudanti dalam skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Hutan Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Pendapatan dan Tingkat Konsumsi Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat), Tahun 2017²². Penelitian ini menjelaskan efektivitas hutan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat juga dalam pemenuhan beberapa

²² Ayudanti, K. “*Analisis Efektivitas Hutan Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Pendapatan dan Tingkat Konsumsi Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat)*”, Universitas IslamNegeri Raden Intan Lampung, 2017

faktor ekonomi yang mana semua orang bergantung pada hasil bumi yang dapat meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat dengan capaian dari beberapa indikator kehutanan yang mana hutan tersebut dapat diambil hasilnya dengan beberapa kesepakatan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama dalam menerapkan fungsi hutan dengan optimal bagi masyarakat yang hidupnya sangat bergantung pada hasil bumi, lebih lagi dalam mendorong kualitas ekonomi mereka, perbedaannya ialah masing-masing mempunyai satu fokus tersendiri, penelitian ini berfokus pada konsep dalam ekonomi Islam yang mana indikatornya jika hutan dapat mengasih maka sebagai manusia juga saling menjaga ekosistemnya.

Adapun perbedaan dari ketujuh penelitian terdahulu dengan peneliti adalah, semua penelitian terdahulu kebanyakan masih berfokus pada kebijakan suatu daerah dalam menjaga ekosistem hutan. Peneliti pertama meneliti bagaimana membuktikan tujuan Korea Selatan adalah berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya dalam kepentingan nasional Korea Selatan di kawasan ASEAN. Adapun peneliti kedua lebih condong pada hasil atau penerapan kebijakan *Green Growth* di Korea Selatan dan dampaknya. Hampir sama dengan peneliti kedua, peneliti ketiga memfokuskan kebijakan Politik Hijau tersebut dapat efisien atau tidak. *Green Growth* sebenarnya mirip dengan pembangunan berkelanjutan, dimana bertujuan untuk mendemonstrasikan bahwa perlindungan lingkungan dengan tidak

mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan peneliti keempat mendeklarasikan bagaimana *Green New Deal* berjalan di korea selatan dengan tidak mengganggu kebijakan-kebijakan pembangunan lainnya. Sedangkan peneliti di sini akan membahas terkait dampaknya terhadap negara Indonesia yakni diukur pada seberapa besar kinerja *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)* dalam kerjasama dengan Indonesia dalam menjalankan berbagai proyek-proyek yang diadakan.

F. ARGUMENTASI UTAMA

Peneliti menduga bahwa implementasi proyek AFoCO di Indonesia tahun 2016-2019 dilaksanakan melalui (1) reboisasi atau penanaman hutan kembali untuk memulihkan daerah yang terkena dampak deforestasi hutan, (2) penerapan izin penebangan hutan secara bertanggung jawab.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

1. BAB I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi tentang gambaran awal dari topik permasalahan yang dengan latar belakang masalah dan alasan-alasan serta sisi-sisi penting dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dalam bab ini juga dipaparkan rumusan masalah yang berupa pertanyaan penelitian juga poin-poin tujuan dan manfaat penelitian.

2. BAB II. KERANGKA KONSEPTUAL

Bab kerangka konseptual ini menjelaskan tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep-konsep tersebut akan dijabarkan masing-masing yang terdiri dari beberapa paragraf. Penjabaran konsep tersebut bertujuan dalam membantu proses penelitian hingga analisis data penelitian.

3. BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian, seperti metode pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, tingkat analisa, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, hingga tahapan penelitian.

4. BAB IV. PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

Bab ini berisi penyajian data yang ditemukan selama penelitian berlangsung di lapangan. Data yang disajikan berupa data primer dan data sekunder. Data tersebut dapat disajikan berupa uraian tulisan, tabel dan gambar yang bisa mendukung hasil penelitian. Berikutnya, akan dijelaskan dan dianalisa hasil dari penelitian tersebut secara runtut sesuai dengan rumusan masalah dan fokus penelitian.

5. BAB V. PENUTUP

Pada bab penutup, peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Peneliti juga mengajukan beberapa saran yang mungkin bisa bermanfaat untuk penelitian serupadi masa yang akan datang.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. KERJASAMA INTERNASIONAL

Kerja sama internasional telah ada dan berkembang selama beberapa dekade terakhir sebagai landasan penelitian hubungan internasional. Definisi kerja sama internasional ini bersifat umum baik dari segi isu maupun aktor. Kerjasama tidak hanya terjadi antara individu namun juga diantara entitas kolektif seperti partai politik, organisasi, perusahaan, atau negara. Walaupun teori kerjasama internasional sering mendefinisikan kerja sama internasional dalam hal negara, ia juga dapat melibatkan aktor lain, terutama organisasi antar pemerintah (IGO) dan organisasi nonpemerintah (LSM). Aktor yang beragam ini bekerja sama untuk berbagai tujuan di berbagai bidang isu: semisal IGO bekerja dengan negara untuk memerangi masalah lingkungan global²³.

Menurut Joseph Greico, kerjasama internasional dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kepentingan antar negara menjadi sebab bagaimana kerjasama itu berjalan. Karena kebanyakan hubungan kerjasama didasari kepentingan yang sama juga menghadapi masalah yang sama. Bentuk kerjasama lainnya yang dilakukan oleh negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional²⁴. Menurut Muhadi

²³ Xinyuan Dai, D. S. *International Cooperation Theory and International Institutions. International Relations Theory*, hal 3. 20 November 2017

²⁴ Joseph Greico, *Cooperation Among Nation , Europe, America & Nontariff Barriers to Trade*, Ithaca, New York: Cornell University Press. 1990

Sugiono, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional²⁵:

1. Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi, politik, militer, ekonomi, dan kultural bersama sama dengan aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola kepentingan berbeda, namun juga dapat memaksakan kehendak negaranya sendiri.

Kerjasama Internasional ini bersifat umum, yang mana tidak terikat pada jumlah anggota, rasa senasib sepenanggungan, asal negara atau syarat-syarat lainnya. Artinya, kerjasama internasional ini memiliki suatu keuntungan karena melihat dari persyaratan tidak harus berasal dari wilayah tertentu jadi negara siapapun dapat bergabung semakin banyak anggota hal tersebut akan semakin baik. Sehingga dapat diketahui bahwa kerjasama internasional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara dan tidak ada persyaratan khusus mengenai asal negara anggota tersebut²⁶.

Kerjasama Internasional memiliki tujuan utama yakni memenuhi kepentingan nasional bagi para anggota yang tidak dimiliki di dalam

²⁵Muhadi Sugiono dalam Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani , 2006, *Pengantar Hubungan Internasional* , Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, hal 15.

²⁶ Fatma, D. *Kerjasama Internasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contohnya*. Ilmugeografi.com. 2017

negerinya. Untuk itu, negara anggota yang kepentingan nasionalnya tidak terpenuhi di dalam negeri perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara. Kerjasama internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, karena hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut²⁷.

Kerjasama internasional itu sendiri diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan negara- negara yang terlibat di dalamnya. Pada dasarnya semua negara menginginkan keuntungan timbal balik yang optimal demi kesejahteraan rakyatnya. Karena itu dalam pelaksanaannya sendiri dapat dilakukan dengan saling tukar menukar barang dan jasa, memperluas penggunaan teknologi, atau dalam pengelolaan sumber daya alam²⁸.

Selain itu kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan negara lainnya juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama antar negara tersebut dapat didasarkan pada faktor perbedaan (perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara, perbedaan iklim dan kesuburan tanah, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan karena perbedaan ideologi), atau karena faktor persamaan (kesamaan sumber daya alam, kesamaan keadaan wilayah

²⁷ Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jakarta, 2019

²⁸William D Coplin, 1992, *Pengantar Politik Internasional: Suatu telaah teoritis*, terj, Marsedes Marbun, Bandung: CV Sinar Baru, hal. 284.

(kondisi geografis), kesamaan ideologi atau agama) yang dimiliki oleh negara-negara yang menjalin kemitraan.

Teori kerjasama internasional dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana implementasi kerjasama Korea Selatan dan *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)* dalam mengaplikasikan SDGs

B. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu agenda kampanye global yang dicetuskan oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara di dunia, sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target *Sustainable Development Goals (SDGs)*²⁹.

Sustainable Development Goals (SDGs) mempunyai prinsip *universality*. Prinsip mendorong penerapan *Sustainable Development Goals (SDGs)* di semua negara baik negara maju maupun negara berkembang. Prinsip kedua adalah *integration*. Prinsip ini memiliki arti bahwa *Sustainable Development Goals (SDGs)* dilaksanakan dengan

²⁹ SDGs Indonesia. *Apa itu SDGs ?* Jakarta: Sustainable Development Goals.2017

saling terkait pada semua aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Prinsip terakhir adalah “*No One Left Behind*” yang menjamin bahwa pelaksanaan *Sustainable Development Goals (SDGs)* harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang peka dalam pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan³⁰. Adapun 17 target *Sustainable Development Goals (SDGs)* antara lain³¹

1. *No Poverty* (Tanpa Kemiskinan) : Memberantas kemiskinan dalam segala bentuknya tetap menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia. Ancaman baru yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, konflik, dan kerawanan pangan, berarti semakin banyak pekerjaan yang diperlukan untuk membawa orang keluar dari kemiskinan.
2. *Zero Hunger* (Tanpa kelaparan) : Bertujuan untuk mengakhiri semua bentuk kelaparan dan kekurangan gizi pada tahun 2030, memastikan semua orang - terutama anak-anak - memiliki makanan yang cukup dan bergizi sepanjang tahun. Ini melibatkan mempromosikan pertanian berkelanjutan, mendukung petani skala kecil dan akses yang sama ke tanah, teknologi, dan pasar.
3. *Good Health and Well-being* (Hidup sehat dan sejahtera) : Berbasis hak dan peka gender sangat penting untuk mengatasi ketidaksetaraan dan membangun kesehatan yang baik untuk semua. Ada jarak 31

³⁰ Penyusun, T. *Potret Awal Tujuan Pengembangan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2016

³¹ UNDP. Programme, U. N. *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*. 2019

tahun antara negara-negara dengan harapan hidup terpendek dan terpanjang. Ini memperhitungkan pelebaran kesenjangan ekonomi dan sosial, urbanisasi yang cepat, ancaman terhadap iklim dan lingkungan, beban HIV dan penyakit menular lainnya yang berkelanjutan, dan tantangan yang muncul seperti penyakit yang tidak menular.

4. *Quality Education* (Pendidikan berkualitas) : Mencapai pendidikan inklusif dan berkualitas untuk semua menegaskan kembali keyakinan bahwa pendidikan adalah salah satu kendaraan paling kuat dan terbukti untuk pembangunan berkelanjutan.
5. *Gender Equality* (Kesetaraan gender) : Mengakhiri semua diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan bukan hanya hak asasi manusia yang mendasar, itu penting untuk masa depan yang berkelanjutan.
6. *Clean Water and Sanitation* (Air dan sanitasi bersih) : Air minum yang aman dan terjangkau untuk semua pada tahun 2030 mengharuskan kita berinvestasi dalam infrastruktur yang memadai, menyediakan fasilitas sanitasi, dan mendorong kebersihan. Melindungi dan memulihkan ekosistem yang terkait air sangat penting.
7. *Affordable and Clean Energy* (Energi bersih dan terjangkau) : Berinvestasi dalam tenaga surya, angin, dan termal, meningkatkan produktivitas energi, dan memastikan energi untuk semua sangat penting jika kita ingin mencapai SDG 7 pada tahun 2030. Memperluas

infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk menyediakan energi yang bersih dan lebih efisien di semua negara akan mendorong pertumbuhan dan membantu lingkungan.

8. *Decent Work and Economic Growth* (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) : Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan inovasi teknologi. Mendorong kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja adalah kunci untuk ini, seperti juga langkah-langkah efektif untuk memberantas kerja paksa, perbudakan dan perdagangan manusia. Dengan target ini dalam pikiran, tujuannya adalah untuk mencapai pekerjaan penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak, untuk semua wanita dan pria pada tahun 2030.
9. *Industry, Innovation and Infrastructure* (Industri, inovasi, dan infrastruktur) : Kemajuan teknologi juga merupakan kunci untuk menemukan solusi jangka panjang untuk tantangan ekonomi dan lingkungan, seperti menyediakan lapangan kerja baru dan mempromosikan efisiensi energi.
10. *Reduced Inequalities* (Berkurangnya kesenjangan) : Ketidaksetaraan pendapatan meningkat hampir di mana-mana dalam beberapa dekade terakhir, tetapi pada kecepatan yang berbeda. Ini terendah di Eropa dan tertinggi di Timur Tengah. Kesenjangan tersebut membutuhkan kebijakan yang sehat untuk memberdayakan mereka.

11. *Sustainable Cities and Communities* (Kota dan komunitas berkelanjutan) : Menjadikan kota berkelanjutan berarti menciptakan peluang karir dan bisnis, perumahan yang aman dan terjangkau, dan membangun masyarakat dan ekonomi yang tangguh. Ini melibatkan investasi dalam transportasi publik, menciptakan ruang publik hijau, dan meningkatkan perencanaan dan manajemen perkotaan dengan cara partisipatif dan inklusif.
12. *Responsible Consumption and Production* (Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab) : Mendorong industri, bisnis, dan konsumen untuk mendaur ulang dan mengurangi limbah sama pentingnya, seperti juga mendukung negara-negara berkembang untuk bergerak ke arah pola konsumsi yang lebih berkelanjutan. Sebagian besar populasi dunia masih mengkonsumsi terlalu sedikit untuk memenuhi kebutuhandasar mereka. Ini dapat membantu ketahanan pangan, dan menggeser kita ke arah ekonomi yang lebih efisien sumber daya.
13. *Climate Action* (Penanganan perubahan iklim) : bertujuan untuk memobilisasi US \$ 100 miliar setiap tahun pada tahun 2020 untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan berinvestasi dalam pembangunan rendah karbon. Tindakan-tindakan ini juga harus berjalan seiring dengan upaya untuk mengintegrasikan langkah-langkah risiko bencana, manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan, dan keamanan manusia ke dalam strategi pembangunan nasional.

14. *Life Below Water* (Ekosistem laut) : Lebih dari tiga miliar orang bergantung pada keanekaragaman hayati laut dan pesisir untuk mata pencaharian mereka. SDG bertujuan untuk mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan dari polusi, serta mengatasi dampak pengasaman laut. Meningkatkan konservasi dan penggunaan sumber daya berbasis laut secara berkelanjutan melalui hukum internasional juga akan membantu mengurangi beberapa tantangan yang dihadapi lautan kita.
15. *Life on Land* (Ekosistem darat) : Setiap tahun, 13 juta hektar hutan hilang, sementara degradasi lahan kering yang terus-menerus telah menyebabkan penggurunan 3,6 miliar hektar, secara tidak proporsional mempengaruhi masyarakat miskin. Hampir 7.000 spesies hewan dan tumbuhan telah diperdagangkan secara ilegal. Tindakan mendesak harus diambil untuk mengurangi hilangnya habitat alami dan keanekaragaman hayati yang merupakan bagian dari warisan bersama kita dan mendukung ketahanan pangan dan air global, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta perdamaian dan keamanan.
16. *Peace, Justice and Strong Institutions* (Perdamaian, keadilan, dan institusi kuat) : Kekerasan seksual, kejahatan, eksploitasi dan penyiksaan juga lazim di mana ada konflik, atau tidak ada aturan hukum, dan negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi mereka yang paling berisiko. SDG bertujuan untuk secara

signifikan mengurangi semua bentuk kekerasan, dan bekerja dengan pemerintah dan masyarakat untuk mengakhiri konflik dan ketidakamanan.

17. *Partnerships for The Goals* (Kemitraan untuk mencapai tujuan) : Dunia lebih saling terhubung dari sebelumnya. Meningkatkan akses ke teknologi dan pengetahuan adalah cara penting untuk berbagi gagasan dan menumbuhkan inovasi. Kebijakan yang terkoordinasi untuk membantu negara-negara berkembang mengelola utang mereka, serta mempromosikan investasi untuk yang paling tidak berkembang, sangat penting untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan³².

Dengan hanya sepuluh tahun tersisa untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, para pemimpin dunia pada KTT SDGs pada bulan September 2019 menyerukan satu dekade tindakan dan pengiriman untuk pembangunan berkelanjutan, dan berjanji untuk memobilisasi pembiayaan, meningkatkan implementasi nasional dan memperkuat lembaga-lembaga untuk mencapai tujuan dengan tanggal target 2030, Sekretaris Jenderal PBB meminta semua sektor masyarakat untuk memobilisasi aksi selama satu dekade pada tiga tingkatan: (1) aksi global untuk mengamankan kepemimpinan yang lebih besar, lebih banyak sumber daya, dan solusi yang lebih cerdas untuk SDGs, (2) tindakan lokal yang menyematkan transisi yang diperlukan dalam kebijakan, anggaran,

³² (2019). *Mengenal Sustainable Development Goals (SDGs) 2045*. CloudHost.

lembaga dan kerangka kerja peraturan pemerintah, kota dan otoritas lokal, (3) dan aksi masyarakat, termasuk oleh pemuda, masyarakat sipil, media, sektor swasta, serikat pekerja, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk menghasilkan gerakan yang tak terhentikan yang mendorong transformasi yang dibutuhkan³³.

Penerapan *Sustainable Development Goals* yang konsisten dapat memberikan kesadaran betapa pentingnya memulihkan keadaan hutan demi mewujudkan hutan yang berkelanjutan (*sustainable forest*). Konsep *sustainable forest* yang dimaksud ialah menyeimbangkan fungsi kawasan hutan dengan masih sejalan dengan kebutuhan akan ekonomi sosial, maupun politik. Beberapa poin sangat relevan dengan isu kehutanan saat ini yakni, Tujuan ke 8, Tujuan 9, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 15. Isu kehutanan butuh penopang yang menjanjikan menjalankan programnya diharapkan dengan tujuan-tujuan dari *Sustainable Development Goals* tersebut menempuh hal yang lebih baik dalam pemulihan hutan saat ini.

C. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Implementasi

Implementasi berarti menempatkan kebijakan baru dengan membawa inovasi sebagai alasan untuk menerapkan kebijakan dan

³³ United Nation. *The Sustainable Development Agenda..2020*

prosedur³⁴. Implementasi dapat didefinisikan sebagai perjanjian internasional ke dalam praktik melalui pengesahan undang-undang nasional, penciptaan lembaga (baik domestik dan internasional) atau penegakan aturan. Selain itu, ini merupakan tahapan dalam proses politik atau kebijakan, untuk dibedakan dari pengaturan agenda, konversi (atau pengambilan keputusan), dan umpan balik³⁵. Namun mengenai implementasi tersebut pasti ada hal yang mana ketidakpastian tetap ada. Misalnya, kapan implementasi itu dimulai dan kapan itu berakhir³⁶

Dengan mengacu pada tujuan awal judul tersebut, implementasi ini berfokus pada penerapan *Sustainable Development Goals* pada program yang dicetuskan AFoCO di Indonesia. Penerapan disini maksudnya adalah bagaimana usaha AFoCO juga pemerintah berusaha dalam pengolahan hutan di masing-masing kawasan yang akan diberdayakan. Tindak lanjut dari masing-masing program AFoCO akan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat nantinya. Melihat konsistensi pemerintah dalam mengolah kehutanan menjadi lebih baik menjadikan kebijakan pemerintah dalam menentukan tata letak lahan, industri kayu juga pengolahan sumber daya masyarakat ini diharapkan dapat memberi suatu inovasi yang

³⁴ Dean L. Fixsen et al. *Implementation Research : A Synthesis of the Literature*. Florida: National Implementation Research Network, Louis de la Parte Florida Mental Health Institute, University of South Florida. 2015

³⁵ Verbeek, J. J. *International Organization and Policy Implementation: Pieces of the Puzzle*. 2004

³⁶ Wisnubro. *Indonesia dan Korea Selatan Memperkuat Kerja Sama Pengelolaan Lahan Gambut*. Jakarta: JPP.go.id. 2019

mampu memberi kontribusi bagi Indonesia. Melalui konsep *Sustainable Development Goals* ini pemerintah bergerak cepat untuk dapat menyelesaikan tujuan-tujuan yang di terindikasi di Indonesia.

2. *Asian Forest Organization Cooperation (AFoCO)*

Organisasi *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)* adalah organisasi antar negara yang berkomitmen untuk memperkuat kerja sama kehutanan regional dengan mengkonversikan teknologidan kebijakan yang terbukti menjadi tindakan nyata dalam konteks pengelolaanutan berkelanjutan untuk mengatasi dampak perubahan iklim³⁷. Organisasi *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)* memiliki kantor pusat yang letaknya di Korea Selatan namun mempunyai satu kantor pusat juga untuk wilayah Asia yakni di negara Vietnam.

Melalui upaya bersama dengan negara-negara anggota, *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)* akan berusaha untuk melakukan dan mempromosikan program kerja sama kehutanan berorientasi aksi di Asia pada:

- a) pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, pemeliharaan dan peningkatan layanan ekosistem, sertareboisasi dan rehabilitasi hutan;

³⁷ AFoCO. *About AFoCO*. Seoul: Asian Forest Cooperation Organization. 2018

- b) kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan mendukung inisiatif di bawah REDD + (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, dan peran konservasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan cadangan karbon hutan di negara-negara berkembang);
- c) pengurangan deforestasi, degradasi hutan, desertifikasi dan degradasi lahan, dan mitigasi dampak bencana terkait hutan;
- d) peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan melalui penelitian dan pengembangan, berbagi pengalaman dan transfer teknologi, serta program pendidikan dan pertukaran; dan
- e) kemitraan antara para anggota dengan entitas lain untuk melakukan kegiatan kerja sama dalam membangun inisiatif dari perjanjian dan organisasi internasional terkait hutan lainnya³⁸.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁸ Member of AFoCO. *AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASIAN FOREST COOPERATION ORGANIZATION (AFoCO)*. Seoul: AFoCO. 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena³⁹.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan format deskriptif, baik terhadap individu maupun kelompok yang lazimnya diteruskan dengan analisis kualitatif pula. Dengan pendekatan ini diharapkan akan diperoleh sebuah gambaran yang obyektif mengenai implementasi kerjasama antara Indonesia dan *Asian Forest Cooperation Organization* (AFoCO)

³⁹ Ardianto, Y. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019

B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Lokasi penelitian bertempat di kantor Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan KLHK di Bogor. Waktu penelitian dilakukan dalam kurun waktu 7 bulan dimulai dari bulan Januari hingga Juli 2020.

C. SUBYEK PENELITIAN DAN TINGKAT ANALISA DATA

Subjek penelitian memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian amati. Dalam penelitian ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI diwakili oleh Ibu Susi (Staf Bagian Asia Pasifik KLHK RI) dan Ibu Dona Octavia (Peneliti Puslitbang Hutan KLHK RI).

Analisis data pada penelitian kualitatif ini peneliti menulis dari bagaimana implementasi kerjasama Indonesia dengan pihak AFoCO. Dengan mewujudkan program-program yang dibentuk oleh organisasi dengan tujuan mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Adapun SDG yang terindikasi dalam penelitian ini ada lima Tujuan. Diharapkan dengan program AFoCO dapat berhasil mewujudkan poin

SDGs tersebut. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara baik apa yang dimaksud skripsi ini.

D. TAHAP-TAHAP PENELITIAN

Menurut Maleong, ada tiga tahapan pokok dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. Tahap pra lapangan, yaitu meliputi kegiatan penentuan fokus, penyesuaian dengan teori dan disiplin ilmu, mencakup observasi awal ke lapangan dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, penyusunan usulan penelitian kemudian dilanjutkan dengan mengurus perizinan penelitian kepada subyek penelitian.
2. Tahap kegiatan lapangan, yaitu meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu tentang Implementasi Kerjasama Indonesia dan *Asian Forest Cooperation Organization* (AFoCO) dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs)
3. Tahap analisis data, yaitu meliputi kegiatan mengolah data yang diperoleh melalui pengamatan peneliti, wawancara mendalam dan dokumentasi, setelah itu dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data dan metode yang digunakan untuk memperoleh data sebagai data yang valid, akuntabel sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna atau penafsiran data yang merupakan

proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.

4. Tahap penulisan laporan, tahap ini meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan menjadi lebih baik sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian.
5. Tahap terakhir adalah melakukan kelengkapan syarat skripsi untuk diadakan ujian.⁴⁰

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian, karena data yang terkumpul akan dijadikan bahan analisis dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan teknik triangulasi yaitu.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana 2 orang atau lebih saling berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya. Penelitian ini menggunakan bentuk wawancara baku terbuka.. Urutan

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 85-103.

pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajian sama untuk setiap responden.

Wawancara digunakan untuk mengetahui data tentang Implementasi Kerjasama Indonesia dan *Asian Forest Cooperation Organization* (AFoCO) dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa instrumen yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan kepada Kepala Staff Bagian Kawasan Asia Pasifik Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga Peneliti dari Puslitbang terkait langsung program AFoCO Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang Implementasi kerjasama kedua belah pihak.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis, sedangkan rekaman adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar maupun elektronik.

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang

perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut.

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data, sebagai berikut:⁴¹

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak penting, maupun penambahan data yang ditinjau masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya tidak sedikit. Reduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan modelnya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dengan menyajikan data akan lebih memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal

⁴¹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

seperti bagan, grafik, dan tabel. Penyajian data merupakan tahap pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

3. Verifikasi Data (*Conclusions Drowing/Verifiying*)

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan jika kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan bila tidak menyamai dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang ditemukan di tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang benar dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang otentik atau dapat dipercaya.

G. TEKNIK PEMERIKSAAN DAN KEABSAHAN DATA

Dalam penelitian kualitatif pengecekan keabsahan data meliputi 1) uji kredibilitas/kejujuran data, 2) uji transferabilitas, 3) uji dependabilitas, 4) uji konfirmabilitas. Namun yang lebih utama adalah uji kredibilitas data yakni dengan melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi lain, dan *member check*.

1. Triangulasi sumber dalam pengujian kredibilitas ini dapat didefinisikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan

dengan berbagai cara. Triangulasi sumber, yaitu untuk menguji data yang ada telah dilakukan di Biro Kerjasama Luar Negeri KLHK RI dan Puslitbang Hutan KLHK RI. Dari dua sumber data tersebut, peneliti mendeskripsikan, mengkategorisasikan mana pandangan yang sama, berbeda, dan spesifik. Triangulasi teknik dalam pengujian kredibilitas data dilakukandengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data diperoleh dari wawancara kemudian dicek dengan data dokumentasi.

2. Triangulasi waktu dalam pengujian kredibilitas data dilakukan melakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, obeservasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Selain triangulasi, uji kredibiltas yang lain adalah menggunakan bahan referensi yang mendukung hasil wawancara.
3. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan uji *transferability*. Setelah membaca hasil penelitian tersebut, pembaca dapat memutuskan apakah bisa mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.
4. Selanjutnya penelitian ini dilakukan uji dependabilitas oleh dosen pembimbing, Ibu Ridha Amaliyah, untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam menyelesaikan penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN DATA

A. PROFIL HUTAN INDONESIA

Sebagai negara yang memiliki hutan tropis yang luas, Indonesia mempunyai banyak keanekaragaman hayati paling banyak di dunia. Dengan mempunyai kawasan hutan yang luas, masyarakat sangat mengandalkan sumber daya hutannya tak terkecuali dengan mengumpulkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun sebagai sektor industri olah kayu. Indonesia dikaruniai dengan salah satu hutan tropis yang paling luas dan paling kaya keanekaragaman hayatinya di dunia. Hutan tropis di Indonesia merupakan rumah bagi habitat flora dan fauna yang tidak tertandingi oleh negara lain dengan ukuran luas yang sama⁴².

Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan yang luas mempunyai cukup tanggung jawab dalam mengolahnnya. Dengan menduduki posisi ketiga dunia pada hutan yang paling luas di dunia, tidak memungkinkan bila Indonesia memiliki beragam masalah yang dihadapi. Dinamika penggunaan lahan hutan di Indonesia, dan khususnya kesulitan menyelesaikan konflik antara konservasi, kebutuhan untuk melestarikan lokal mata pencaharian, tuntutan industri penebangan, baik legal maupun ilegal.⁴³.

⁴² Charles Victor Barber. Dkk., *Keadaan Hutan Indonesia*, (Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch, 2001), diakses 15 Februari 2020, <http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2011/07/phki-2001-fwi-low-res.pdf>

⁴³ Budy Resosudarmo, *Forest Land Use Dynamics in Indonesia*, (Research Gate : ANU College of Asia and the Pacific, 2012), diakses 20 Februari 2020, [file:///C:/Users/Admin/Downloads/Forest_Land_Use_Dynamics_in_Indonesia%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Admin/Downloads/Forest_Land_Use_Dynamics_in_Indonesia%20(1).pdf)

Gambar 4.1 Infografis Hutan Tropis Indonesia



Sumber: <http://www.tamboramuda.org/2016/07/infografis-hutan-tropis-indonesia.html>

Hutan tropis Indonesia adalah rumah dan tempat perlindungan terakhir bagi salah satu keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Hutan merupakan rumah rumah bagi 12 persen mamalia dunia, reptil dan amfibi 7,3 persen dan, 17 persen spesies burung serta banyak spesies palem yang tumbuh di hutannya. Hutan masih menyimpan misteri spesies yang belum diidentifikasi⁴⁴. Pada tahun 2018, berdasarkan UU NO 41 TAHUN 1999. Setiap provinsi di Indonesia memiliki setidaknya 30% kawasan hutan dari luas wilayahnya.

⁴⁴ "Forest," WWF, diakses 15 Februari 2020, https://www.wwf.or.id/en/about_wwf/whatwedo/forest_species/about_forest_species/forest/

Walaupun Indonesia hanya terdiri dari 1,3 persen dari luasnya tanah di bumi, Indonesia mempunyai separuh keanekaragaman hayati yang sangat banyak, termasuk 11 persen dari spesies tanaman dunia, 10 persen dari spesies mamalia, dan 16 persen jenis burung. Sebagian besar spesies ditemukan di hutan Indonesia. Tiga pulau utama pusat kekayaan spesies adalah Papua (tinggi kekayaan spesies dan endemisme), Kalimantan (tinggi kekayaan spesies, endemisme sedang), dan Sulawesi (kekayaan spesies moderat, endemisme tinggi)⁴⁵.

Kawasan hutan ialah area khusus yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Penetapan kawasan hutan ditujukan untuk menjaga keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai penggerak arus perekonomian lokal, regional dan nasional maupun global⁴⁶. Maraknya alih fungsi hutan dalam membuat kawasan hutan Indonesia untuk penghijauan semakin menyusut adapun dampak yang sangat terlihat ialah rawannya bencana. Seperti longsor karena proses penggudulan hutan yang berlebihan menyebabkan pohon tidak dapat menahan lajunya tanah, abrasi laut karena kurangnya pohon mangrove yang mana berfungsi meredam gelombang air laut saat pasang⁴⁷.

⁴⁵ Emily Matthews,. Dkk,. *The State of Forest Indonesia*, (Indonesia : World Resources Institute, 2002), diakses 18 Februari 2020, <https://wri-indonesia.org/sites/default/files/45%20-%20The%20State%20of%20the%20Forest.pdf>

⁴⁶ Wirendro Sumargo,. Dkk,. *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, (Jakarta, Indonesia : Forest Watch Indonesia edisi Pertama, 2011), diakses 18 Februari 2020, <file:///C:/Users/Admin/Downloads/POTRET%20KEADAAN%20HUTAN%20INDONESIA.pdf>

⁴⁷ “Kian Marak Alih Fungsi Hutan, Wajar Jika Alam tak Bersahabat,” Kompasiana.com, diakses 19 Februari 2020, <https://www.kompasiana.com/penaulum/5a232077d14aeb23533eef92/alih-fungsi-hutan-alam-bisa-tak-bersahabat>

B. FUNGSI KAWASAN HUTAN DI INDONESIA

Indonesia sebagai negara yang luas mengalokasikan 120,6 juta hektar atau sekitar 63 persen dari luas daratannya sebagai Kawasan Hutan. Sedangkan kawasan daratan sisanya berupa areal bukan kawasan hutan yang dikenal sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). Kawasan Hutan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu:

1. Hutan Produksi meliputi area seluas 68,8 juta hektar atau 57 persen dari Kawasan Hutan;
2. Hutan Konservasi meliputi areal seluas 22,1 juta hektar atau 18 persen dari Kawasan Hutan (dengan tambahan 5,3 juta hektar dari kawasan konservasi perairan);
3. Hutan Lindung memiliki fungsi perlindungan daerah aliran sungai dan meliputi areal seluas 29,7 juta hektar atau 25 persen⁴⁸. Komposisi sebaran peta indikatif areal perhutanan sosial terhadap kawasan hutan terdiri atas 12,4 juta ha (67%) berada di hutan lindung, 2,8 juta ha (15%) berada di hutan produksi, 2,6 juta ha (14%) berada di hutan produksi terbatas dan selebihnya berada di kawasan konservasi⁴⁹. Setidaknya ada 19 jenis hutan yang berbeda di Indonesia, termasuk hutan pantai di pantai dan bukit pasir; hutan pasang surut seperti hutan bakau, nipah, dan palem; hutan kesehatan yang berhubungan dengan

⁴⁸ Ruandha Agung, *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2018.

⁴⁹ Hannah Timmins, *Opsi Legal Perlindungan Hutan Pada Lahan Zona Pertanian Di Indonesia*, 2017 <https://www.earthworm.org/uploads/files/OPSI-LEGAL-PERLINDUNGAN-HUTAN-IN-INDONESIA-PADA-LAHAN-ZONA.pdf>

tanah berpasir yang buruk; dan gambut, rawa, lahan basah, hijau sepanjang tahun, bambu, sabana, dan hutan pegunungan⁵⁰.

Dari 4.000 spesies pohon di Indonesia, hanya 120 spesies kayu keras yang diakui cocok untuk penggunaan komersial. Dari jumlah tersebut, sekitar 48 digunakan dalam industri kayu lapis. Dari angka resmi 144 juta hektar, 34% ditujukan untuk perlindungan dan Taman Nasional, dan 21% ditujukan untuk konversi ke penggunaan lain. 45% sisanya dikelola untuk produksi kayu dan produk hutan lainnya⁵¹.

Selain itu, pemanfaatan hutan produksi lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu⁵². Hutan produksi telah menjadi salah satu sumber utama untuk mendukung pembangunan ekonomi bagi banyak negara Asia-Pasifik. Ini menghasilkan baik produk kayu dan non-kayu serta jasa lingkungan, yang menghubungkan kehutanan dengan ekonomi dan peraturan iklim dan air, untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut⁵³.

Kekhawatiran tentang menipisnya hutan dunia, termasuk di kawasan Asia-Pasifik, telah menyebabkan banyak seruan internasional untuk upaya serius untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, dan meningkatkan pengelolaan hutan. Kekhawatiran ini mencerminkan apresiasi terhadap

⁵⁰ FAO, "INDONESIA FOREST," <http://www.fao.org/3/w7730e/w7730e07.htm>," diakses 20 Februari

⁵¹ Ibid., (FAO, "INDONESIA FOREST," <http://www.fao.org/3/w7730e/w7730e07.htm>)

⁵² Mega Dinda Larasati, *Hutan Produksi : Pengertian, Jenis, Sebaran, dan Peraturan*, Forester Act, 2016, diakses 21 Februari, <https://foresteract.com/hutan-produksi/>

⁵³ "Production Forests," Center for International Forestry Research, 2018, diakses 21 Februari 2020

fungsi ekologis dan ekonomi hutan produksi sebagai penyedia hasil hutan kayu dan non-kayu, sebagai habitat bagi sebagian besar keanekaragaman hayati dunia, dan sebagai pengatur lingkungan lokal, regional dan global⁵⁴.

C. DEFORESTASI HUTAN DI INDONESIA

Deforestasi juga dapat disebut sebagai penghilangan hutan yang menyebabkan beberapa ketidakseimbangan secara ekologis dan lingkungan. Dampak langsung dari berkurangnya hutan ialah akan menyebabkan timbulnya dampak jangka panjang yang menjadikan hutan hujan tropis semakin terkikis oleh deforestasi jika masalah tersebut tidak segera diatasi⁵⁵. Deforestasi sendiri bisa disebut dengan perubahan secara tetap dari area berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.

Industri sawit, yang dapat ditemukan dalam segala hal mulai dari sampo hingga garam Pertanian, penggembalaan ternak, pertambangan, dan pengeboran merupakan lebih dari setengah deforestasi. Di Malaysia dan Indonesia, hutan ditebang untuk membuat jalan untuk memproduksi minyak kelapa⁵⁶.

Data Lingkungan Hidup, *World Wildlife Fund*, memprediksi Kalimantan akan kehilangan 75 persen luas wilayah hutannya pada 2020

⁵⁴ “Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2019,” Karhutla Monitoring Sistem, Diakses 20 Februari 2020, http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran

⁵⁵ “Deforestation: Compromises of a Growing World,” Conserve Energy Future, diakses 20 Februari 2020, <https://www.conserve-energy-future.com/causes-effects-solutions-of-deforestation.php>

⁵⁶ Christina Nunez, *Deforestation explained*, National Geographic, 2019, diakses 20 Februari 2020, <https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/deforestation/>

menyusul tingginya laju deforestasi. Dari sekitar 74 juta hektar hutan yang dimiliki Kalimantan, hanya 71% yang tersisa pada 2005. Sementara jumlahnya pada 2015 menyusut menjadi 55%. Jika laju penebangan hutan tidak berubah, Kalimantan diyakini akan kehilangan 6 juta hektar hutan hingga 2020, artinya hanya kurang dari sepertiga luas hutan yang tersisa⁵⁷.

Kondisi lain penyebab hutan mengalami penurunan ialah deforestasi yang terjadi secara terus menerus tanpa terkendali. Indonesia memiliki tingkat deforestasi tertinggi di dunia, bahkan melebihi Brasil semmentarahnya memiliki seperempat luas hutan Brasil. Pemicu utama deforestasi adalah dalam urutan besarnya berikut ini: industri kelapa sawit, *illegal logging*, industri pertambangan, ekspansi kota⁵⁸.

1. Industri Kelapa Sawit

Selama beberapa tahun terakhir ini 2011-2016, para pakar menemukan industri sawit telah menyebabkan deforestasi seluas 2,08 juta hektar atau 23 persen dari kerusakan hutan nasional. Di Indonesia proses pembuatan perkebunan kelapa sawit yakni dengan mengeringkan lahan gambut yang mengandung banyak karbon dan mudah terbakar⁵⁹. Komoditas kelapa sawit di Indonesia dalam satu dekade terakhir terus mengalami kenaikan. Menurut Gabungan

⁵⁷ “Bagaimana Hutan Indonesia Sebagai Paru-Paru Dunia di Masa Depan ?,” Good News From Indonesia, diakses 15 Februari 2020, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/12/bagaimana-hutan-indonesia-sebagai-paru-paru-dunia-di-masa-depan>

⁵⁸ “Valuing the ecosystem of the Indonesian rainforest,” GreenFacts Scientific Board, diakses 15 Februari 2020, <http://www.greenfacts.org/en/indonesian-forests/1-2/index.htm>

⁵⁹ “Indonesian Forests & Palm Oil,” GreenPeace, diakses 15 Februari 2020, <https://www.greenpeace.org/usa/issues/indonesian-forests-palm-oil/>

Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, kelapa sawit dapat diproduksi paling tidak 40 juta ton per tahun mulai dari tahun 2020⁶⁰.

Akibat lingkungan dari industri perkebunan kelapa sawit menyebabkan deforestasi juga dampak yang negatif bagi Indonesia. Selain itu, ketidakseimbangan di lingkungan ditemukan dalam bentuk gangguan di tanah, hilangnya karbon dari biomassa, serta akumulasi bahan organik karena rawa gambut untuk pembangunan kelapa sawit. Penggunaan seperti pupuk dan pestisida juga mengancam ekosistem darat dan perairan di wilayah tersebut⁶¹.

2. *Illegal Logging*

Pembalakan liar didefinisikan sebagai kegiatan rantai pasokan kayu ilegal, yang meliputi penebangan, pengangkutan, penyimpanan, pemasaran, penjualan, dan pembelian serta pemanfaatan kayu ilegal. Penebangan liar juga termasuk penebangan di dalam kawasan hutan tanpa izin yang sah atau dengan cara yang tidak sesuai dengan persyaratan izin⁶². Penebangan liar memiliki dampak besar pada hilangnya hutan tropis di negara-negara utama yang menyebabkan sebagian besar deforestasi.

Persoalan pembalakan liar memang sulit untuk diatasi karena luasnya hutan Indonesia, tidak memungkiri jika ada pihak-pihak yang

⁶⁰ Indonesian Rainforests, "Rainforest Action Network", diakses 18 Februari 2020, <https://www.ran.org/indonesian-rainforests/>

⁶¹ "Dampak Kelapa Sawit", Tuk Indonesia, 2015, <https://www.tuk.or.id/2015/01/22/dampak-kelapa-sawit/>

⁶² Luca Tacconi, *Proses Pembelajaran (Learning Lessons) Promosi Sertifikasi Hutan dan Pengendalian Penebangan Liar di Indonesia*, Center for International Forestry Research (CIFOR), 2003, diakses 11 maret 2020, https://www.cifor.org/publications/pdf_files/books/btacconi0402.pdf

merugikan negara bertindak semena-mena. Perlu pantauan yang lebih untuk mengorganisir kawasan hutan yang sering terjadi pembalakan liar⁶³.

Upaya pemerintah dalam mengurangi kasus pembalakan liar perlu dukungan dan kerjasama serta kesadaran masyarakat. Hutan semakin berkurang apabila masalah ini tidak segera ditangani dengan baik. Sebagai negara dengan hutan yang luas, Indonesia memiliki tugas dalam mengurangi pembalakan liar yang semakin marak di tanah air.

3. Pertambangan

Sektor pertambangan di Indonesia menyumbang sekitar 7 persen dari deforestasi nasional. Hal tersebut dikarenakan jika membuka suatu lahan untuk pertambangan maka, dibutuhkan beberapa luas hutan yang akan hilang. Sejalan dengan kontribusinya dalam mengurangi pepohonan, pertambangan Indonesia kian hari makin meluas⁶⁴.

Meskipun sektor tambang Indonesia tidak seagresif kawasan asia lainnya dikarenakan adanya kebijakan mengurangi ekspor bahan tambang ke luar negeri guna mencegah dampak negatif bagi lingkungan. Pertambangan Indonesia memang kurang menarik dikarenakan regulasi yang tidak pasti. Kasus contoh terbaru ialah

⁶³ "Pembalakan Liar sulit dipidana ?", Kompasiana.com, 2015,
<https://www.kompasiana.com/kotijah/54fec9f3a33311624450f8be/pembalakan-liar-sulit-dipidana>

⁶⁴ "Analisis dan Evaluasi pengelolaan sumber daya alam",
https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_tentang_pengelolaan_sda.pdf

penghentian ekspor bijih nikel per 1 Januari 2020. Kebijakan ini dicetuskan oleh Menteri ESDM⁶⁵.

Namun karena kebijakan tersebut Indonesia mampu menahan laju pengurangan hutan tiap tahunnya. Memang ekonomi untuk pertumbuhan kualitas masyarakat penting, namun menjaga hutan tetap pada fungsinya juga hal yang sulit.

4. Urbanisasi

Urbanisasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota ini menyangkut penambahan masyarakat di kota. Suatu proses sosio-ekonomi yang memiliki banyak segi antara lain, perubahan sikap hidup, berubahnya mata pencaharian, khususnya dari pertanian ke industri⁶⁶. Semakin berkembangnya industrialisasi menyebabkan banyaknya pabrik-pabrik yang dibangun untuk memenuhi sumber daya manusia agar dapat bekerja. Ini merupakan dampak yang cukup negatif bagi lingkungan.

Pengelolaan hutan akan semakin sulit, karena cepatnya laju urbanisasi yang memaksa kawasan hijau dihilangkan untuk membangun perumahan, pabrik dan sebagainya. Dampak positif dari urbanisasi pun tidak dapat dielakkan karena struktur ekonomi lebih bervariasi, berkembangnya usaha wiraswasta, berkembangnya bidang

⁶⁵ Gora Kunjana, "Peluang dan Tantangan Sektor Pertambangan pada 2019", 2018, diakses pada 11 maret 2020, <https://investor.id/archive/peluang-dan-tantangan-sektor-pertambangan-pada-2019>

⁶⁶ Ishak, *Urbanisasi dan dampaknya bagi lingkungan*, Jurnal UGM, Humaniora Volume XIII NO 3, 2001, file:///C:/Users/Admin/Downloads/734-896-2-PB%20(1).pdf

pendidikan. Namun juga dampak negatif seperti berkurangnya area terbuka hijau, pencemaran udara akibat industri, pencemaran air⁶⁷.

D. Kerjasama Bidang Kehutanan Indonesia di Level Internasional

Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah membuat negara-negara bertekad untuk mengadakan kerjasama. Salah satu negara ialah Korea Selatan yang menjadikan Indonesia *partner* dalam bidang kehutanan. Dengan kerjasama kedua negara, Korea Selatan mendirikan *Korea Indonesia Forest Center*. Dimana *Korea Indonesia Forest Center* tersebut didirikan pada tanggal 29 Juni 2010, ketika *Discussion Note* antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Dinas Kehutanan Korea mengenai Pembentukan dan Operasi *Korea Indonesia Forest Center* ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pembentukan *Korea Indonesia Forest Center* adalah untuk menanggapi meningkatnya proyek kerja sama di bidang kehutanan antara Korea dan Indonesia. Melalui pembentukan *Korea Indonesia Forest Center*, diharapkan komunikasi antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dengan Dinas Kehutanan Korea menjadi lebih efektif, terutama dalam hal implementasi proyek dalam kehutanan⁶⁸.

⁶⁷ Andi Muhammad Nur Fauzan Hayyu, “Mengelola Urbanisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi”, *detikNews*, 2019, diakses 11 Maret 2020, <https://news.detik.com/kolom/d-4504255/mengelola-urbanisasi-untuk-pertumbuhan-ekonomi>

⁶⁸ Colfer, C.J.P., Dahal, G.R. dan Capistrano, D. *Pelajaran dari Desentralisasi Kehutanan: Mencari Tata Kelola yang Baik dan Berkeadilan di Asia-Pasifik*. CIFOR, Bogor, Indonesia.2009

Sejarah pertemuan bidang kehutanan Indonesia dan Korea Selatan tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1. Agenda Indonesia dan Korea Selatan di Bidang Kehutanan

TAHUN	AGENDA	HASIL
1968	Konsensi Perusahaan Korea	PT. Kodeco mendapatkan izin konsensi di kawasan Batu Licin, Kalimantan Selatan dengan luas 270.000 hektar ⁶⁹
1970	Konsensi	PT. Korindo mendapatkan izin konsensi 120.000 hektar di Kalimantan Timur
1973	Konsensi	- Gyeongnam Kyouk mendapat izin di kawasan Tarakan dengan luas 200.000 hektar - Haninhyungup mendapat di Kawasan Kalimantan Tengah dengan luas 100.000 hektar
1976	Konsensi	Ajuimup mendapat izin di kawasan Kalimantan Barat dengan luas 115.000 hektar
1979	Pertemuan Pertama Komite Kehutanan	Menyepakati Kerjasama di bidang pengolahan kayu, dimana Korea

⁶⁹ "HISTORY," Korea Indonesia Forest Center

	Indonesia-Korea Selatan di Jakarta	Selatan menyediakan teknisi, pendanaan dan teknologi, sedangkan pasokan bahan baku dan produk olahan kayu Indonesia diekspor hanya ke Korea Selatan ⁷⁰ .
1987	Pertemuan Komite Kehutanan Indonesia – Korea Selatan	Menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerjasama bidang Kehutanan.
2006	Menandatangani MOU di Bidang Investasi pada hutan dan tanaman	Mengembangkan sektor swasta kedua negara di bidang pengembangan perkebunan hutan di Indonesia.
2007	Pertemuan pertama Forum Hutan Indonesia-Korea Selatan (IKFF)	- Pembentukan tiga komite yaitu : Komite Hutan Tanaman, Komite Perlindungan Hutan, dan Komite Penelitian - Pada pertemuan tersebut juga ditandatangani perjanjian Kerjasama antara Korea Green Promotion Agency (KGPA) dengan Perum Perhutani di bidang pengembangan

⁷⁰ Nita Karolin, Kerjasama Korea Selatan Dan Indonesia Dalam Industri Energi Biomassa Kayu, Universitas Mulawarman, 2019, Diakses 15 Februari 2020, [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2019/10/JURNAL%20OKTAVIA%20NITA%20KAROLIN%20\(10-30-19-04-42-28\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2019/10/JURNAL%20OKTAVIA%20NITA%20KAROLIN%20(10-30-19-04-42-28).pdf)

		energi biomassa di Semarang, Jawa Tengah
2009	Menandatangani pembentukan Korea Indonesia Forest Center	Dibahas beberapa agenda terkait perhutanan sosial, hutan rekreasi, dan ekowisata, pengelolaan lahan gambut, konservasi bibit, dan investasi kehutanan.
2013	Kerjasama bidang rekreasi hutan	Pembangunan Sentul Eco Edu Tourism Forest, Membangun Tunak Recreation di Taman Wisata Alam Gunung Tunak dan Membangun Rumah Korea di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ⁷¹

Sumber: AFoCO

Dari beberapa contoh diatas pertemuan awal Indonesia dan Korea Selatan yang membuka kerjasama tentang kehutanan ialah pada tahun 1979 yakni awal pertama pembahasan tentang kehutanan dengan menjanjikan beberapa kesepakatan seperti di bidang pengolahan kayu, dimana Korea Selatan menyediakan teknisi, pendanaan dan teknologi, sedangkan pasokan bahan baku dan produk olahan kayu Indonesia diekspor hanya ke Korea Selatan. Selain itu kerjasama ini tidak hanya terkait pendanaan kehijauan juga, namun lambat laun kedua belah pihak

⁷¹ Ibid “https://www.menlhk.go.id/site/single_post/1390”

membangun suatu tempat seperti taman atau wahana lain yang mendukung adanya kerjasama kedua negara.

Dengan beberapa pertemuan tersebut diatas terlihat jika Korea Selatan sejak dulu sudah menaruh hati pada lingkungan hutan di Indonesia. Di luar untuk kepentingan nasional namun sebagian besar hutan tersebut juga digunakan untuk mereforestasi kehutanan yang sudah gundul. Dengan beberapa perjanjian kedua negara dicetuskan beberapa kesepakatan akan perlindungan untuk hutan juga pemberian izin lahan bagi Korea Selatan.

Dalam pengembangan kerjasama kehutanan Indonesia juga memiliki beberapa negara yang sangat konsisten dalam pengembangan ekosistem hutan dan melestarikan kehidupan hutan. seperti beberapa negara ini

1. Indonesia – Jerman

Forests and Climate Change Programme Indonesia-Jerman dilaksanakan bersama oleh Kementerian Kehutanan Indonesia, *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)* untuk kerjasama teknis dan *KfW Entwicklungsbank (KfW)* untuk kerjasama finansial. Hibah dari Jerman didanai oleh Kementerian untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Federal Jerman (BMZ). Program ini diharapkan dapat berjalan dari 2009 hingga 2020. Biaya seluruhnya kini diperkirakan mencapai sekitar 70-80 juta euro. Tingkat kesuksesan program ini akan dilihat dari tingkat referensi emisi CO₂ dari deforestasi dan degradasi hutan pada kabupaten-

kabupaten terpilih, serta pada area investasi umum dan khusus di REDD+ di Indonesia dan juga pada kesuksesan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan taraf hidup masyarakat di daerah tempat dilaksanakannya program tersebut⁷².

2. Indonesia – Jepang

Kerjasama ini dilaksanakan baik melalui instansi pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Saat ini kerjasama Indonesia dengan Jepang meliputi berbagai aspek bidang kehutanan, antara lain bidang konservasi, pengembangan sumberdaya manusia, dan bidang reboisasi dan rehabilitasi hutan. Kerjasama dengan pemerintah Jepang dilakukan melalui kerjasama bilateral regional maupun multilateral dalam bentuk *loan* (pinjaman) dan *grant* (hibah). Kerjasama tersebut pada umumnya dalam bentuk *grant-aid*, *technical assistance*, serta pengiriman staf Departemen Kehutanan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar dan kegiatan lainnya di Jepang. Instansi Pemerintah Jepang yang menjadi mitra kerja dalam kerjasama ini adalah Forestry Agency (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries), Ministry of Foreign Affairs, Environment Agency dan JICA (Japan International Cooperation Agency). Kerjasama bilateral mendatang sebagai hasil dari kunjungan Duta Besar Kazuwo Asakai, akan dilakukan dalam kerangka Inisiatif Kerjasama Kehutanan Asia.

⁷² FORCLIME,” Pemerintah Jerman dukung Program Forests and Climate Change (FORCLIME)”, <https://www.forclime.org/id/18-bahasa-indonesia/berita/221-german-government-supports-forests-and-climate-change-programme>

3. Indonesia – Australia

Indonesia dan Australia sepakat mengagendakan kerja sama dalam hal peatland, mangrove, serta sampah plastik laut. Kerja sama ini merupakan lanjutan dari kesuksesan kedua negara menjadi tuan rumah dalam AsiaPacific Rainforest Summit (APRS). Indonesia dan Australia juga saling mendukung pelaksanaan NDC masing-masing negara. NDC Australia adalah 26-27% sedangkan Indonesia 29-41%, 17% dari tahun ini berasal dari sektor kehutanan. Kerja sama bidang blue carbon, peatland, dan mangrove yang tingkat emisinya tinggi akan bagus bagi kedua negara. proyek INCAS sangat membantu dalam penghitungan karbon di seluruh Indonesia. Sistem ini sudah dapat diaplikasikan untuk berbagai sektor, di antaranya yang berbasis darat yang menjadi sektor utama untuk pengurangan emisi, serta sektor energi dan transportasi⁷³.

E. Profil dan Program AFoCO (*Asian Forest Cooperation Organizations*)

1. Profil

Organisasi internasional yang kredibel dan akuntabel yang berbasis di Asia, menangani masalah-masalah kehutanan yang muncul untuk kepentingan tersebut anggota kami dan wilayah tersebut. Tindakan kooperatif diarahkan untuk berkontribusi untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan Asia yang lebih hijau⁷⁴. Perjanjian tentang Pembentukan Organisasi Kerjasama Hutan Asia (AFoCO) akan mulai

⁷³ Media Indonesia, "Indonesia-Australia Agendakan Kerja Sama Lingkungan Hidup, 2018

⁷⁴ "About AFoCO," AFoCO

berlaku pada tanggal 27 April 2018. Proyek dan program AFoCO dikembangkan dan diimplementasikan berdasarkan kebutuhan dan arah kebijakan negara-negara pemrakarsa⁷⁵. Dengan negara negaraanggota AFoCO akan berusaha untuk melakukan dan mempromosikanprogram kerja sama kehutanan berorientasi aksi di Asia pada: pengelolaan hutan berkelanjutan; meningkatkan cadangan karbon hutan dan mendukung inisiatif terkait terkait; mengatasi deforestasi dan degradasi hutan; memperkuat pembangunan kapasitas dan penelitian dan pengembangan di sektor kehutanan, dan; pembentukan kemitraan yang dibangun di atas upaya internasional terkait hutan saat ini dan inisiatif global.

Gambar 4.2. Logo AFoCO



Sumber : AFoCO, 2018

AFoCO memiliki pengaturan kelembagaan dengan dua organ, yaitu "Majelis," dan "Sekretariat." Majelis adalah badan pembuat keputusan yang terdiri dari perwakilan semua pihak dalam perjanjian. Sekretariat, dipimpin oleh direktur eksekutif dan berlokasi di Korea,

⁷⁵ "About AFoCO," AFoCO, diakses 15 Februari 2020, <http://afocosec.org/the-agreement/>

bertanggung jawab atas implementasi, koordinasi, pemantauan dan pelaporan kegiatan di bawah AFoCO⁷⁶. Wilayah intervensi proyek meliputi rehabilitasi hutan, pencegahan degradasi hutan, konservasi keanekaragaman hayati, peningkatan mata pencaharian melalui produk hutan non-kayu dan spesies bernilai tinggi dan pengembangan kapasitas.

AFoCO melakukan berbagai program kerja sama kehutanan yang dirancang untuk mengelola hutan secara berkelanjutan dan untuk mengatasi perubahan iklim di negara-negara anggota dan seluruh Asia. Ini juga akan mewakili kepentingan Korea Selatan dan negara-negara anggota lainnya dengan mengambil bagian aktif dalam negosiasi tentang isu-isu internasional utama di bidang kehutanan⁷⁷. AFoCo memiliki 15 negara anggota yaitu : Bhutan, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Kazakhstan, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, Vietnam yang mana negara tersebut bergabung untuk memperbaiki keadaan hutan. Pada 2016, Perjanjian AFoCO baru ditandatangani tiga negara yaitu Korea, Timor Leste, dan Indonesia. Perjanjian tersebut akan diberlakukan entry into force sedikitnya lima negara meratifikasi.

⁷⁶ AsianForestCooperationOrganization to be launched with 14 nations,” The Korea Herald, Diakses 15 Februari 2020, <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20180423000430>

⁷⁷ “Agreement on Establishment of Asian Forest Cooperation Organization to be Brought into Force,” Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, Diakses 15 Februari 2020, http://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=319802&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=1&titleNm=

Dalam perencanaan program AFoCO di sampaikan bahwa pendanaan meliputi⁷⁸ :

- 1). Dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan Organisasi harus terdiri dari kontribusi wajib dan sukarela.
- 2). Kontribusi wajib diberikan dalam bentuk kontribusi dan / atau uang tunai. Republik Korea akan berkontribusi delapan puluh persen (80%) dari Pengeluaran Operasional tahunan, sedangkan Para Pihak lainnya masing-masing akan berkontribusi satu persen (1%) dari Pengeluaran Operasional tahunan atau jumlah tetap tidak kurang dari tiga puluh ribu dolar AS (USD) 30.000). Kontribusi yang tersisa harus disediakan oleh sumber lain. Jumlah kontribusi wajib oleh masing-masing Pihak dapat ditinjau secara berkala oleh Majelis.
- 3). Kontribusi dalam bentuk barang mengacu pada kontribusi non-moneter, yang nilainya dapat dikaitkan dengan biaya menghadiri pertemuan atau acara resmi, menyelenggarakan pertemuan atau acara resmi dan kegiatan lain yang mungkin ditentukan dan disetujui oleh Majelis.
- 4). Para Pihak dapat memberikan kontribusi sukarela tambahan untuk Organisasi.
- 5). Majelis akan mengadopsi aturan dan peraturan keuangan, termasuk aturan yang mengatur kontribusi wajib dari Para Pihak, yang akan menentukan kondisi untuk pengelolaan dana.

⁷⁸ *The Assembly of Asian Forest Cooperation Organization*

6). Dana akan dikenakan audit eksternal yang independen setiap tahun.

2. **Programs and Projects**⁷⁹

a. Capacity Building for Landscape Approach to Support the Sustainable Natural Resources Management

Dalam mengaplikasikan program tersebut ada beberapa negara yang ikut gabung yakni : Brunei Darussalam, Indonesia, Philippines & Singapore. Dengan mengikuti program yang memiliki durasi waktu sekitar 3 tahun yaitu dari tahun 2016-2019

Program tersebut bertujuan untuk pengembangan kapasitas untuk pendekatan lansekap untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Proyek ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama kehutanan lintas batas antara empat negara yang menerapkan serta di dalam kawasan ASEAN melalui penerapan pendekatan lanskap dalam pengelolaan sumber daya alam.

b. Domestication of Endangered, Endemic & Threatened Plant Species in Disturbed Terrestrial Ecosystem

Beberapa program ada juga yang dikhususkan bagi beberapa negara tertentu untuk membenahi permasalahan yang ada di negara tersebut seperti Malaysia & Thailand. Dengan diberiwaktu selama 6 tahun yakni dari tahun 2016-2022 program tersebut diharapkan dapat membawa dampak yang positif.

⁷⁹ “PROGRAM AND PROJECTS AFoCO,” AFoCO, Diakses 15 Februari 2020, <http://afocosec.org/the-agreement/>

Program ini bertujuan untuk domestikasi spesies tumbuhan langka, endemik dan terancam di ekosistem terestrial yang terganggu. Proyek ini terutama bertujuan untuk mengembangkan dan mentransfer teknik domestikasi Spesies Tumbuhan Terancam Punah, Endemik dan Terancam di ekosistem terestrial yang terganggu dan konservasi keanekaragaman hayati di Malaysia dan Thailand.

c. Developing High Valuable Species as a Mechanism for Sustainable Forest Management & Livelihood Improvement for Local Communities

Program ini diikuti oleh dua negara yaitu Vietnam dan Thailand. mempunyai durasi waktu 2 tahun dari tahun 2016-2018. Program ini bertujuan untuk mengembangkan spesies berharga tinggi sebagai mekanisme pengelolaan hutan berkelanjutan & peningkatan mata pencaharian bagi masyarakat lokal. Tujuan keseluruhan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan hutan berkelanjutan dan mata pencaharian masyarakat lokal di Vietnam dan Thailand melalui pengembangan spesies bernilai tinggi.

d. Facilitating the Participatory Planning of Community-based Forest Management Using GIS & RS Technologies in Forest Resources Management

Pembentukan program ini diikuti oleh tiga negara yaitu Indonesia, Filipina dan Thailand. Memiliki waktu lima tahun dalam mengaplikasikannya dari tahun 2015-2019. Yang memungkinkan dapat membawa perubahan bagi masyarakat.

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi perencanaan partisipatif pengelolaan hutan berbasis masyarakat menggunakan teknologi GIS & RS dalam pengelolaan sumber daya hutan. Tujuan keseluruhan dari proyek ini adalah untuk berkontribusi pada peningkatan sumber daya hutan dan pengelolaannya, khususnya di daerah pemukiman masyarakat.

e. Promotion of Forest Rehabilitation through Demonstration

Models & Improvement of Seed Supply System

Promosi program ini diikuti oleh negara Kamboja dan Vietnam, dengan memiliki waktu yang cukup lama untuk mengimplemenatasikannya yakni lima tahun (2015-2019).

Program ini bertujuan untuk promosi rehabilitasi hutan melalui model demonstrasi & peningkatan sistem pasokan benih. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mempromosikan reboisasi dan rehabilitasi hutan melalui survei dan pemeriksaan akses yang lebih baik ke benih berkualitas / bahan tanam spesies pohon terkemuka dan melalui pembentukan model percontohan untuk rehabilitasi hutan di Kamboja dan Vietnam, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

f. Capacity Building on Improving Forest Resources Assessment and Enhancing the Involvement of the Local Communities to Address the Impact of Climate Change

Mempunyai program yang membawa dampak bagi masyarakat sekitar, program ini diikuti oleh delapan negara yakni Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Myanmar, Philippines, Thailand & Viet Nam. Program ini cukup memiliki anggota yang bergabung namun hanya sedikit waktu dalam pengaplikasikannya yaitu hanya 2 tahun 6 bulan dari tahun 2013-2016. Mungkin cukup sebentar namun dengan saling mendukung dan membantu akan lebih mudah mencapainya.

Program ini bertujuan untuk pengembangan kapasitas dalam meningkatkan penilaian sumber daya hutan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

g. Reclamation, Rehabilitation & Restoration of Degraded Forest Ecosystems (RRR-DFE) in Mekong Basin Countries

Program kedua dengan anggota negara terbanyak yakni diikuti oleh 5 negara yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, memiliki waktu durasi selama 2 tahun yakni 2013-2015.

Program ini bertujuan reklamasi, rehabilitasi & restorasi ekosistem hutan terdegradasi (RRR-DFE) di Negara-negara Lembah Mekong. Sasaran dan Tujuan Proyek RRR-DFE bertujuan

untuk memperkuat kerja sama lintas batas dalam konservasi keanekaragaman hayati, restorasi hutan, pengelolaan daerah aliran sungai, dan ekowisata di antara lima MBC melalui uji coba, menyelenggarakan lokakarya tentang praktik terbaik dan alih teknologi, dan kegiatan pengembangan kapasitas.

F. IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA - AFoCO (ASIAN FOREST COOPERATION ORGANIZATIONS)

Dalam proyeknya di Indonesia, *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)* mempunyai kawasan yang akan observasi untuk menerapkan program yang usulkan yakni :

- 1) Pengembangan Kapasitas untuk Pendekatan Lansekap untuk Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan.
- 2). Memfasilitasi Perencanaan Partisipatif Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Menggunakan GIS (Sistem Informasi Geografis) & RS (Teknologi Penginderaan Jauh) Teknologi GIS dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan.
- 3). Pengembangan Kapasitas dalam Meningkatkan Penilaian Sumber Daya Hutan dan Meningkatkan Keterlibatan Komunitas Lokal untuk Mengatasi Dampak Perubahan Iklim⁸⁰.

⁸⁰ AFoCO, "International Agreement On Environment And Natural Resources", Department of Environment and Natural Resources, 2019, Diakses 27 Februari 2020, <http://intl.denr.gov.ph/index.php/asean-environmental-agreements/article/7>

Di bulan April 2017, AfoCO dan Puslitbang Hutan KLHK RI memfasilitasi penyusunan rencana pengelolaan hutan berbasis masyarakat di tiga lokasi percontohan yaitu :

- 1) Hutan Desa/Nagari Paru, KPHL Sijunjung, Sumatera Barat;
- 2) Kemitraan Kehutanan Cempaka, Desa Sumber Bandung, KPHL Batutegei, Lampung;
- 3) Hutan Kemasyarakatan Tuar Tana Sikka, Desa Hikong, KPH Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan akan sangat mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Dalam implementasinya, AFoCO dan KLHK RI mengutamakan pemanfaatan teknologi untuk perencanaan pengelolaan hutan, seperti Sistem Informasi Geografis (GIS) dan Penginderaan Jauh (RS). Selain itu, kegiatan yang berfokus pada pengembangan sumberdaya manusia di kawasan hutan percontohan pun diupayakan, misalnya berbagai program alih teknologi dan pelatihan pemasaran digital⁸¹.

⁸¹ “Puslitbang Hutan Perkuat Kerjasama Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di KPHL Sikka NTT,” Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi KLHK, 2019, Diakses 28 Februari 2020, <https://www.forda-mof.org/berita/post/6232-puslitbang-hutan-perkuat-kerjasama-pengelolaan-hutan-berbasis-masyarakat-di-kphl-sikka-ntt>

1 . Hutan Desa Paru Sijunjung, Sumatera Barat

Fokus dari penerapan program AFoCO di Hutan desa Paru ialah dengan Memfasilitasi Perencanaan Partisipatif Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Menggunakan GIS (Sistem Informasi Geografis) & RS (Teknologi Penginderaan Jauh) Teknologi dalam Manajemen Sumber Daya Hutan. Hutan Paru dengan luas 4.500 hektar terletak di Desa Paru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Itu berada di bawah pengelolaan Unit Pengelolaan Hutan Lindung Sijunjung, Dinas Kehutanan Sumatera Barat. Sumberdaya potensial adalah tengkawang (*Shorea, sp*), jelutung (*Dyera costulata*), madu, jernang (*Daemonorops, sp*), rotan, batu resin, dan sarang walet⁸³.

Hutan Desa Paru memiliki kesuburan tanah yang baik, sumber air dan pohon langka berukuran besar yang dapat digunakan sebagai laboratorium alami untuk penelitian kegiatan dan juga masih memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Ada banyak potensi hasil hutan non kayu di hutan desa Paru, tetapi saat ini hanya dipanen dalam jumlah kecil dan dijual tanpa diolah.

⁸² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Forest Rehabilitation through Community Forest-Based Enterprise GIS Technology to Support Community Based Forest Management Planning in Indonesia” . Forest Research and Development Center – FORDIA

⁸³ “PROFIL KPHL MODEL SIJUNJUNG (PROVINSI SUMATERA BARAT),” SINPASDOK KPH, 2012, Diakses 24 Februari 2020, http://kph.menlhk.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=139:profil-kphl-model-sijunjung-provinsi-sumatera-barat&catid=100:sumatera-barat&Itemid=337

Dengan sumber daya yang tersedia, AFoCO dapat melatih masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengolah bahan baku dari hutan⁸⁴. Hal ini menunjukkan bahwa agribisnis berbasis hutan dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan basis hutan untuk memastikan keberlanjutan produk hutan. Masyarakat di Hutan Desa Paru menjaga hutan tropis mereka sebagai hutan lindung dan melarang penebangan pohon. Masyarakat menyadari fungsi hutan dalam menyediakan air. Oleh sebab itu masyarakat Desa Paru mulai mengembangkan ekowisata dan produk hutan non kayu seperti rotan, madu, kemiri, kopi. Kegiatan alih teknologi ini merupakan upaya dan terobosan pertama yang dilakukan atas inisiatif bersama melihat potensi Nagari Paru Kab Sijunjung yang selama ini merupakan salah satu penghasil rotan di Sumatera Barat⁸⁵. Upaya ini dilakukan agar ke depannya Sijunjung bukan hanya menjadi penyokong bahan baku, namun juga mampu menjadi penghasil produk rotan yang mampu bersaing di pasar.

Menyokong kegiatan alih teknologi tersebut, AFoCO dan KLHK RI mendatangkan fasilitator dari Kelompok Keahlian Manusia dan Produk Industri serta Kelompok Keahlian Manusia dan Ruang Interior dari Universitas Telkom sekaligus pemilik brand produk rotan dari Bandung, Akara Nusantara. Mereka memberikan berbagai pemahaman tentang rotan, mulai dari pengolahan, desain, ketrampilan dasar, pengagasan ide, hingga

⁸⁴ “Community Based Forest Management: What is the urgency,” AFoCo Regional Project Component 3—Forest Research and Development Center

⁸⁵ Ibid “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Forest Rehabilitation through Community Forest-Based Enterprise GIS Technology to Support Community Based Forest Management Planning in Indonesia” . Forest Research and Development Center – FORDIA

mencari potensi sumber daya pengrajin sebagai pengembangan alternatif. Pada kesempatan ini pula, masyarakat diberikan beberapa alat pengolahan madu sebagai modal awal usaha (*start up capital*) dalam pengembangan mata pencaharian untuk mendukung agribisnis berbasis hutan di Nagari Paru.⁸⁶

2. Kemitraan Kehutanan Cempaka Batutegi, Lampung

Kemitraan Kehutanan Cempaka dengan luas 170 ha terletak di Desa Sumber Bandung, Pringsewu Kabupaten, Provinsi Lampung. Di lokasi ini, ada enam kelompok petani dengan total 170 anggota. Potensi Kemitraan Kehutanan Cempaka adalah pala, karet, kopi, pisang, coklat, gula aren, kemiri, petai, durian, nangka, cengkeh dan jengkol⁸⁷.

Dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, Unit Pengelolaan Hutan Batutegi memiliki peran strategis karena ketersediaan air sangat mendukung kedaulatan pangan dan energi listrik. Sekitar tujuh kabupaten mendapat manfaat dari daerah tangkapan air Batutegi. Keberadaan tangkapan air ini menambah nilai manfaat jasa lingkungan dari hutan ini. Kawasan hutan didominasi oleh kakao, kopi, dan karet. Ada beberapa sumber air baik berupa air terjun atau mata air⁸⁸.

⁸⁶ Octavia dan Windyoningrum. "Alih Teknologi Pengolahan Rotan Dalam Mendukung Agribisnis Berbasis Hutan". Info Brief, Juli 2018. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

⁸⁷ FORDIA. "Community Based Forest Management: What is the Urgency". Ministry of Environment and Forestry.

⁸⁸ Ibid.

3. Tuar Tana Sikka, Nusa Tenggara Timur

Hutan Kemasyarakatan Tuar Tana dengan luas 346,9 ha terletak di Desa Hikong, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah pengelolaan Unit Pengelolaan Hutan Lindung Sikka. Hutan ini terdiri dari 3 kelompok/blok dengan total 266 petani. Potensi kawasan hutan antara lain jambu mete, kemiri, kelapa, kakao, suren, palawan kenari, kasogi dan aranana. Area ini memiliki 11 mata air yang berfungsi baik dari kurang lebih 30 mata air tersedia, yang mana 6 di antaranya mengalir sepanjang tahun.⁸⁹

Budaya dan kearifan lokal masyarakat Desa Hikong dalam pengelolaan hutan membantu masyarakat dalam melestarikan hutan⁹⁰. Aturan adat masih terpelihara dengan baik, antara lain penentuan awal musim tanam dengan memperhatikan perubahan alam seperti melintasnya burung di wilayah desa. tanah longsor atau banjir yang disebabkan curah hujan yang tinggi. Pohon dapat menahan tanah yang melaju dan dapat menahan lajunya air. Masyarakat juga menganggap pohon adalah makhluk hidup. Jika pohon dipanen, mereka harus melalui beberapa ritual adat dan izin dari tetua adat dan harus menanam kembali pohon dua kali lebih banyak dari yang telah ditebang⁹¹. Kearifan lokal tersebut terbukti dapat membantu dampak kehilangan pohon dan mampu mengatasi perubahan iklim semisal ada bencana.

⁸⁹ KPHL Flores Timur (Unit VIII), "Data Dan Informasi KPH Sistem Informasi Spasial Dan Dokumentasi (SINPASDOK)". http://kph.menlhk.go.id/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=228

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Kuswardono dan Dj Windy, "Pengetahuan Tradisional Untuk Menentukan Musim Tanam yang Berubah, Studi kasus : Forum Iklim Lintas Aktor di 8 Desa di Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan Provinsi NTT". Workshop Praktek Adaptasi Masyarakat.

https://www.academia.edu/12279368/Pengetahuan_Tradisional_untuk_menentukan_Musim_Tanam_yang_Berubah_Studi_kasus_Forum_Iklim_Lintas_Aktor_di_8_Desa_di_Kabupaten_Kupang_dan_Timor_Tengah_Selatan_Provinsi_NTT_1

G. Kerjasama Internasional dengan AFoCO (*Asian Forest Cooperation Organization*)

Dalam menghadapi isu kehutanan Indonesia membutuhkan partner atau negara yang memiliki permasalahan yang sama. Sebagai negara tropis terbesar di Asia Tenggara bukanlah hal mudah untuk melakukan sendiri. Indonesia memiliki hutan yang mana menjadi sumber alami pasokan oksigen bagi negara juga dunia. Maka dari itu persoalan lingkungan merupakan isu penting yang mana wajib dibahas dalam ranah internasional.

Begitu dalam cangkupan pembahasan tingkat internasional Indonesia dapat mengetahui negara-negara yang memiliki persoalan yang hampir sama. Kerjasama kedua negara memungkinkan saling menguntungkan dalam persoalan lingkungan hidup. Dalam mencapai suatu kesuksesan kemakmuran suatu negara butuh saling membantu. Kerjasama Internasional merupakan pintu awal dalam menjalin hubungan dengan suatu negara.

Tujuan kerjasama internasional Indonesia-Korea Selatan ini ialah sebagai wadah dalam memenuhi kebutuhan kepentingan nasionalnya masing-masing. Dalam kaitan itu kepentingan nasional Indonesia ialah mengurangi deforestasi yang mana menyebabkan kehilangan pohon yang bekerja mengurangi karbon dioksida. Sedangkan kepentingan nasional Korea Selatan sendiri ialah mengurangi emisi gas rumah kaca, yang pada akhirnya sama-sama bagaimana menjaga hutan tetap lestari.

Dengan tujuan yang sama tersebut Indonesia maupun Korea Selatan dapat saling menguntungkan dan dapat mempercepat proses kesejahteraan. Pada dasarnya memang teori kerjasama ini semua negara menginginkan timbal balik yang optimal demi kesejahteraan rakyatnya. Karena itu dalam prosesnya, kerjasama ini diselingi oleh tukar menukar barang, memperluas penggunaan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam serta pemberdayaan sumber daya manusia.

Dalam perspektif kerjasama internasional, negara Korea Selatan membentuk organisasi yang bernama *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)* untuk mendorong terwujudnya visi Korea Selatan yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca dalam kurun waktu 30 tahun. Alasan lainnya berdasarkan fakta mengapa Korea Selatan mencetuskan organisasi yang anggotanya ialah negara-negara di Asia, karena kawasan Asia mempunyai cukup banyak hutan untuk lebih menghasilkan oksigen.

Kerjasama ini menguntungkan pihak Asia karena sebagian besar biaya ditanggung oleh Korea Selatan itulah mengapa kerjasama ini termasuk kerjasama internasional yang saling menguntungkan. Karena kedua negara juga negara-negara yang bergabung di *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)* pun juga mempunyai komitmen yang kuat untuk pemulihan hutan kembali dan pencegahan deforestasi juga mencegah perubahan iklim.

Upaya Indonesia untuk melaksanakan agenda SDGs dibangun berdasarkan pengalaman atas pelaksanaan selama 15 tahun pelaksanaan

MDGs, Indonesia berhasil mencapai 49 dari 67 target indikator yang ditetapkan. SDGs tidak hanya relevan sebagai komitmen global, tapi juga menjadi panduan untuk menjadi negara maju. SDGs tersebut menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi yaitu, Pemerintah dan Parlemen, Filantropi dan Bisnis, Ormas, Akademisi dan Pakar dalam rangka mensukseskan pelaksanaan agenda SDGs⁹². SDGs bertujuan menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan.

Korea Selatan sadar bahwa dalam mewujudkan visi tersebut tidak bisa sendiri, maka dari itu membutuhkan negara-negara yang mampu membantu mewujudkannya. Karena kedua negara juga negara-negara yang bergabung di *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)* pun juga mempunyai komitmen yang kuat untuk pemulihan hutan kembali dan pencegahan deforestasi juga mencegah perubahan iklim.

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah sepakat menerapkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* untuk berkomitmen menyukseskan pelaksanaan programnya juga memfokuskan lebih yakni melalui berbagai kegiatan dan telah mengambil langkah-langkah penting. Dengan penerapan SDGs ini Indonesia kini berusaha menghindari

⁹² "Indonesia dan SDG," Media Indonesia, 2015, Diakses 28 Februari 2020, <https://mediaindonesia.com/read/detail/124290-indonesia-dan-SDG>

keterlambatan karena setiap tujuan SDGs tersebut mempunyai *timeline* sendiri. Indonesia sebisa mungkin mengejar tujuan-tujuan SDGs yang belum terealisasi di Indonesia.

Kerjasama Indonesia-Korea Selatan memberi dampak yang baik melalui program-program AFoCO. Program yang dicetuskan AFoCO yang bertempat di Sumatera Barat, Lampung, dan NTT telah dijalankan dengan baik dan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Di antara 17 tujuan SDGs, program AFoCO di Indonesia terindikasi memenuhi 4 tujuan SDGs yakni :

1. Tujuan 8 : Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Penerapan tujuan ke 8 dari SDGs ini ialah adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang mana mendapatkan subsidi pemberdayaan masyarakat dari kerjasama AFoCO. Masyarakat diberdayakan dalam kegiatan pengolahan perabotan dari kayu. Dengan begitu, masyarakat dapat mengolah pohon dengan baik pula. Program ini berimbas pada meningkatnya produktivitas sumber daya manusia yang mana akan mengurangi tingkat kemiskinan juga akan membuka lapangan pekerjaan yang selaras dengan lingkungannya.
2. Tujuan Tujuan ke-12 : Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Penerapan tujuan ini adalah dengan pola konsumsi Masyarakat yang bertanggung jawab atas hutan tersebut. Penebangan pohon tidak diperbolehkan di ketiga area hutan. Hal yang diperbolehkan adalah pemungutan hasil hutan non kayu.

3. Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim. Penerapan tujuan ke-13 ini ialah menekankan pengendalian hutan dalam penggunaannya seperti sistem tebang-tanam, sehingga keseimbangan antara kebutuhan dan pelestarian lingkungan dapat tercapai. Sumber daya hutan sangat penting karena saat ini perubahan iklim yang sangat tajam. Pemanasan global mendesak semua belahan masyarakat agar lebih fokus ke lingkungan. Kurangnya kepedulian terhadap hutan merupakan hal negatif nantinya bagi masa depan lingkungan penghijauan bila tidak dijaga dari sekarang.
4. Tujuan ke-15 : Ekosistem daratan. Mengimplementasikan dari kesemua elemen tujuan yang relevan diatas dapat diambil kesimpulan jika dalam penanaman pohon dapat menyelamatkan juga menyeimbangkan dan juga bisa memberi banyak hal positif bagi masyarakat. Untuk mendukung pemanfaatan hasil hutan yang optimal dalam pelaksanaan rencana ini, AFoCO Regional Project bekerjasama dengan Pusat Litbang Hutan dan KPHL Sijunjung melaksanakan Alih Teknologi Pengolahan Rotan untuk mendukung agribisnis hutan⁹³.

Di era global, konsep pengelolaan hutan produksi lestari telah berkembang menjadi sangat kompleks. Ketika luas dan potensi hutan makin menurun, kebutuhan sumberdaya hutan makin meningkat, masalah sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat seperti pengakuan hak-hak adat dan pembagian distribusi manfaat hutan semakin merebak, parameter pengelolaan hutan produksi lestari berkembang dalam perspektif multidimensi. Manajemen hutan lestari harus mampu

⁹³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Forest Rehabilitation through Community Forest-Based Enterprise GIS Technology to Support Community Based Forest Management Planning in Indonesia" . Forest Research and Development Center (FORDIA).

mengakomodir tiga macam fungsi kelestarian. Kelestarian fungsi produksi (ekonomi), kelestarian fungsi lingkungan (ekologi) dan kelestarian fungsi sosial, ekonomi budaya bagi masyarakat setempat. Manajemen hutan lestari perlu memperhatikan beberapa aspek: (1) Keutuhan fungsi ekosistem, yakni interaksi, interdependensi, harmoni, keanekaragaman, dan keberlanjutan ekosistem; (2) Memperhatikan dampak pembangunan terhadap lingkungan dengan menerapkan sistem analisa mengenai dampak lingkungan; (3) Pemangku kepentingan senantiasa mempertimbangkan, tidak hanya kepentingan generasi sekarang, tetapi juga kepentingan generasi masa depan; (4) Pengelolaan bersifat dinamis dan fleksibel.

Penerapan Konsep *Sustainable Development Goals* yakni mengindikasikan program apa saja yang dapat mewujudkan beberapa tujuan tersebut. Kontinuitas ekonomi masyarakat lokal dalam bentuk produksi makanan pokok berupa buah, sayur-sayuran, dan tanaman medis selama ini didukung oleh penanam komoditas hutan. Peran hutan sebagai penyedia jasa layanan ekosistem lengkap dengan biodiversitas yang terkandung di dalamnya diketahui mampu memenuhi cita-cita perkembangan berkelanjutan bagi populasi dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan. Tujuan Utama dari SDG's sebagai Pelindung Kelestarian Hutan ialah, Yang pertama adalah untuk memperbaiki kerusakan hutan di dunia melalui manajemen hutan yang berkelanjutan meliputi perlindungan, restorasi, aforestrasi dan reforestrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan degradasi hutan. Kedua untuk meningkatkan manfaat hutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi meliputi peningkatan kehidupan yang berkelanjutan untuk komunitas yang menggantungkan hidupnya pada hutan. Ketiga, meningkatkan secara signifikan

proporsi daerah perlindungan hutan di dunia beserta daerah manajemen hutan lainnya sebagai penghasil produk hutan. Dan yang terakhir adalah untuk mengubah penurunan dari dukungan pengembangan resmi maupun bantuan finansial tambahan maupun baru dari berbagai sumber dari implementasi manajemen hutan yang berkelanjutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi yang dilakukan oleh AFoCO adalah

- 1) Mengembangkan kapasitas masyarakat pengelola hutan untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan Kemitraan Kehutanan Cempaka dengan luas 170 haterletak di Desa Sumber Bandung, Pringsewu Kab. Provinsi Lampung di bawah pengelolaan Batutegi, Dinas Kehutanan Lampung sebagai daerah hengkapan air dari penampung Batutegi yang menjadi sumber air bagi daerah sekitarnya, menambah nilai manfaat jasa lingkungan dari hutan ini.
- 2) Memfasilitasi perencanaan partisipatif pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Hutan Paru dengan luas 4.500 hektar terletak di Desa Paru, Provinsi Sumatera Barat. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan tidak hanya menciptakan sumber mata pencaharian, namun juga mengasah dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Masyarakat mengelola sumberdaya hutan.
- 3) Pengembangan kapasitas dalam meningkatkan penilaian sumberdaya hutan dan meningkatkan keterlibatan komunitas lokal untuk mengatasi dampak perubahan iklim di Hutan Kemasyarakatan Tuar Tana. Pengelolaan hutan membantu masyarakat dalam melestarikan keberadaan hutan.

B. Saran

Dalam proses penelitian hingga laporan skripsi ini, peneliti sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan batasan data dan ketidaksempurnaan peneliti menyampaikan penelitian maupun hasil penelitian, peneliti membuka selebar lebarnya kesempatan untuk memberi masukan maupun saran yang dapat menyempurnakan penelitian serta menambah wawasan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang bisa diberikan kepada peneliti selanjutnya, Indonesia dapat mengurangi tingkat deforestasinya, meskipun saat ini sudah mengalami penurunan. Kerjasama ini memungkinkan untuk kedua negara lebih aktif lagi dalam menggalakkan program untuk kelestarian hutan, baik Indonesia maupun Korea Selatan untuk lebih lestari lagi. Analisis yang dilakukan mungkin mempunyai banyak kesalahan, dengan begitu peneliti punya saran untuk pihak-pihak selanjutnya yang memiliki minat untuk membahas topik tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penulis berharap untuk para pembaca ataupun para studi Hubungan Internasional untuk menggunakan teori maupun konsep yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, 2006, *Pengantar Hubungan Internasional*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, hal 15
- Ardianto, Y. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia.2019
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 85-103
- Verbeek, J. J. *International Organizations and Policy Implementation: Pieces of the Puzzle*. 4.2004
- William D Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu telaah teoritis*, Marsedes Marbun, Bandung: CV Sinar Baru, hal. 284, 1992.
- Wirendro, Soelthon Gussetya, Frionny A., Isnenti Apriani, *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, (Jakarta, Indonesia : Forest Watch Indonesia edisi Pertama2011),

JURNAL

- Budy Resosudarmo, “Forest Land Use Dynamics in Indonesia”, (Research Gate : ANU College of Asia and the Pacific, 2012), file:///C:/Users/Admin/Downloads/Forest_Land_Use_Dynamics_in_Indonesia %20(1).pdf
- Conserve Energy Future “Deforestation: Compromises of a Growing World,”, <https://www.conserve-energy-future.com/causes-effects-solutions-of-deforestation.php>
- GreenFacts Scientific Board, “Valuing the ecosystem of the Indonesian rainforest,”, <http://www.greenfacts.org/en/indonesian-forests/1-2/index.htm>
- GreenPeace, “Indonesian Forests & Palm Oil”, <https://www.greenpeace.org/usa/issues/indonesian-forests-palm-oil/>
- Ishak, “Urbanisasi dan dampaknya bagi lingkungan”, Jurnal UGM, Humaniora Volume XIII NO 3, 2001, file:///C:/Users/Admin/Downloads/734-896-2-PB%20(1).pdf
- SiPongi, “Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2019”, Karhutla Monitoring Sistem, nlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Forest Rehabilitation through Community Forest-Based Enterprise GIS Technology to Support Community Based Forest Management Planning in Indonesia" . Forest Research and Development Center – FORDIA
- Kwon-hyoung, S. J.-h. "Asian Forest Cooperation Organization to be launched with 14 nations". Seoul: The Korea Herald. 2018.
- Widoyono, Bangun Sentot, *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2016
- Santosa, A. V. Role of ROK Government in the 'Green. 1. 2011. (<https://kohviko.files.wordpress.com/2011/12/role-of-rok-government-in-the-green-new-deal-policy.pdf>)
- Xinyuan Dai, D. S. International Cooperation Theory and International Institutions. *International Relations Theory*, hal. 3. 20 November 2017

SKRIPSI

- Adwat, R. *Pengelolaan Hutan Konservasi Desa Bagi Resistensi Masyarakat Desa Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong (Studi Kasus: Desa Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu*, Universitas Bengkulu, 2016
- Ayudanti, K. "Analisis Efektivitas Hutan Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Pendapatan dan Tingkat Konsumsi Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat)", Universitas IslamNegeri Raden Intan Lampung, 2017
- Dean L. Fixsen., *Implementation Research : A Shynthesis of the Literature*. Florida: National Implementation Research Network, Louis de la Parte Florida Mental Health Institute, University of South Florida. 2015
- Febrianti, S. F. Kebijakan Low Carbon Green Growthdi Korea Selatan : Sebuah Tinjauan Politik Hijau. 2018. (<http://eprints.umm.ac.id/43132/1/PEDAHULUAN.pdf>)
- Hairiah, Kurniatun, and Sumeru Ashari, *Pertanian Masa Depan: Agroforestri, Manfaat, Dan Layanan Lingkungan*, Universitas Brawijaya, 2013, <http://old.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/proceeding/PR0043-15/PR0043-15-3.pdf>
- Joseph Greico, *Cooperation Among Nation , Europe, America & Nontariff Barriers to Trade*, Ithaca, New York: Cornell University Press. 1990

Karolin, N., *Kerjasama Korea Selatan Dan Indonesia Dalam Industri Energi Biomassa Kayu*, Universitas Mulawarman, 2019, [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2019/10/JURNAL%20OKTAVIA%20ONI%20TA%20KAROLIN%20\(10-30-19-04-42-28\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2019/10/JURNAL%20OKTAVIA%20ONI%20TA%20KAROLIN%20(10-30-19-04-42-28).pdf)

Oktaverian, N. . *Tujuan Korea Selatan Mengusulkan Pembentukan Asean Korea Forest Cooperation*. 2016
1.(<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/78836/NILA%20OKTAVERINA.pdf?sequence=1>)

Putra, A. *Implementasi Kebijakan Green Growth Korea Selatan*. 1. 2014.
(<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/3108/3010>)

Prabawati, S. *Peranan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Wonogiri*, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016

WEBSITE ONLINE

AFoCO. *About AFoCO*. Seoul: Asian Forest Cooperation Organization. 2018

Agreement on Establishment of Asian Forest Cooperation Organization to be Brought into Force,” Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, http://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=319802&srchFr=&srcHTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=1&titleNm=

Agustian, W. "Rahasia Seoul yang Sukses Menjadi Kota Hijau". Okezone.com. 2013,
<https://economy.okezone.com/read/2013/06/28/471/829040/rahasia-seoul-yang-sukses-menjadi-kota-hijau>

Asian Forest Cooperation Organization,” Department of Environment and Natural Resources International Agreement On Environment And Natural Resources”, 2019, <http://intl.denr.gov.ph/index.php/asean-environmental-agreements/article/7>

FAO, “INDONESIA FOREST,” <http://www.fao.org/3/w7730e/w7730e07.htm>

Fatma, D. "Kerjasama Internasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contohnya". Ilmugeografi.com. 2017, <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/kerjasama-internasional>

- FORDIA. "Community Based Forest Management: What is the Urgency". Ministry of Environment and Forestry.
- Good News From Indonesia, "Bagaimana Hutan Indonesia Sebagai Paru-Paru Dunia di Masa Depan ?",
<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/12/bagaimana-hutan-indonesia-sebagai-paru-paru-dunia-di-masa-depan>
- Gora Kunjana, "Peluang dan Tantangan Sektor Pertambangan pada 2019", 2018,
<https://investor.id/archive/peluang-dan-tantangan-sektor-pertambangan-pada-2019>
- GreenFacts Scientific Board, "Valuing the ecosystem of the Indonesian rainforest," <http://www.greenfacts.org/en/indonesian-forests/1-2/index.htm>
- Indonesia.go.id, "Anugerah dari Hutan Indonesia," Redaksi. T, 2019,
<https://www.indonesia.go.id/ragam/keanekaragaman-hayati/ekonomi/anugerah-dari-hutan-indonesia>
- Kementerian PPN / Bappenas SDGs. *Empat Pilar SDGs*. Jakarta: 2016,
https://www.bappenas.go.id/files/9915/0397/6784/Siaran_Pers_-_Komitmen_Serius_Indonesia_dalam_Melaksanakan_Sustainable_Development_Goals_2015-2030.pdf
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Tegaskan Komitmen Kerjasama Kehutanan Di Tingkat Asia, Menteri LHK Tandatangani Perjanjian AFoCO". Jakarta: PPID.2016,
http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/366
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Indonesia dan Korea Selatan Memperkuat Kerja Sama Pengelolaan Lahan Gambut". Jakarta: JPP.go.id.2019,
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan "Tegaskan Komitmen Kerjasama Kehutanan Di Tingkat Asia, Menteri LHK Tandatangani Perjanjian AFoCO", PPID,
http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/366
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Profil Kphl Model Sijunjung (Provinsi Sumatera Barat)", Sinpaskok Kph, 2012,
http://kph.menlhk.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=139:profil-kphl-model-sijunjung-provinsi-sumatera-barat&catid=100:sumatera-barat&Itemid=337
- Kompasiana.com "Kian Marak Alih Fungsi Hutan, Wajar Jika Alam tak Bersahabat," , diakses 19 Februari 2020,
<https://www.kompasiana.com/penaulum/5a232077d14aeb23533eef92/alih-fungsi-hutan-alam-bisa-tak-bersahabat>

- Kompasiana.com, “Pembalakan Liar sulit dipidana?”, 2015, <https://www.kompasiana.com/kotijah/54fec9f3a33311624450f8be/pembal-aka-n-liar-sulit-dipidana>
- Korea Indonesia Forest Center “HISTORY,”
- Media Indonesia, “Indonesia dan SDGs,” 2015, <https://mediaindonesia.com/read/detail/124290-indonesia-dan-SDGs>
- Mega Dinda Larasati, “Hutan Produksi: Pengertian, Jenis, Sebaran, dan Peraturan”, Forester Act, 2016, <https://foresteract.com/hutan-produksi/>
- Mikaela Weisse, Elizabeth Dow Goldman, “Dunia Kehilangan Hutan Primer Seluas Belgia di Tahun 2018,” WRI Indonesia, 2019, <https://wri-indonesia.org/id/blog/dunia-kehilangan-hutan-primer-seluas-belgia-di-tahun-2018>
- Muhammad. Andi, “Mengelola Urbanisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi” ,detikNews, 2019, diakses 11 maret 2020, <https://news.detik.com/kolom/d-4504255/mengelola-urbanisasi-untuk-pertumbuhan-ekonomi>
- Murdaningsih, D. “Indonesia Tandatangani Kerja Sama Kehutanan Tingkat Asia”. REPUBLIKA.CO.ID. 2016, (<https://nasional.republika.co.id/berita/obb407368/indonesia-tandatangani-kerja-sama-kehutanan-tingkat-asia>)
- Nancy Harris, Pete Potapov “Lanskap Hutan Utuh Penting untuk Perubahan Iklim. Inilah Tiga Alasannya,” WRI Indonesia, 2017, Diakses 3 Januari 2020, <https://wri-indonesia.org/id/blog/lanskap-hutan-utuh-penting-untuk-perubahan-iklim-inilah-tiga-alasannya>
- Nunez. D, “Deforestation explained”, National Geographic, 2019, <https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/deforestation/>,
- Organization, A. F. *Article 12 Budget and Finance*. Seoul: AFoCO.2018
- SDGs Indonesia. “Apa itu SDGs?”, Jakarta: Sustainable Development Goals.2017
- Tuk Indonesia, “Dampak Kelapa Sawit”, 2015, <https://www.tuk.or.id/2015/01/22/dampak-kelapa-sawit/>
- Tuti “Direktur Eksekutif AFoCo Berkunjung Ke Kampus Badan Litbang dan Inovasi,” Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi KLHK, 2016, <https://www.forda-mof.org/index.php/berita/post/2748>
- UNDP. Programme, U. N. *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*. 2019
- United Nation.” The Sustainable Development Agenda”..2020, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/>

Viva Budy Kusnandar, "Deforestasi di Indonesia Menurut Jenis Lahan (1990-2017)", Databoks, 2019, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/20/inilah-deforestasi-di-indonesia-periode-1990-2017>

WWF, "Forest," diakses 15 Februari 2020, https://www.wwf.or.id/en/about_wwf/whatwedo/forest_species/about_forest_species/forest/

SEMINAR

Lilik Budi, Ellyn K, Syarif Indra, Mariana, "Pengarusutamaan Nilai, Status, Monitoring Biodiversitas dan Ekosistem." Dipresentasikan di Seminar Nasional Konservasi Biodiversitas di Sub-Regional Sumatera Bagian Selatan, di Palembang pada tanggal 14-15 Januari 2015.

WEBSITE

Carnemark, C." *Forests and the Environment*,2,".World Bank, 2013.

Center for International Forestry Research,*Production Forests*, 2018,

Charles Victor Barber, Emily Matthews, *Keadaan Hutan Indonesia*, (Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch, 2001), <http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2011/07/phki-2001-fwi-low-res.pdf>

Colfer, C.J.P., Dahal, G.R. dan Capistrano, D. *Pelajaran dari Desentralisasi Kehutanan: Mencari Tata Kelola yang Baik dan Berkeadilan di Asia-Pasifik*. CIFOR, Bogor, Indonesia.2009

Emily. Matthews,. *The State of Forest Indonesia*, (Indonesia : World Resources Institute, 2002), diakses 18 Februari 2020, <https://wri-indonesia.org/sites/default/files/45%20-%20The%20State%20of%20the%20Forest.pdf>

Forqan, B. N. *Hukum Lingkungan , Pemanasan Global, Skema Global Dan Implikasinya Bagi Indonesia*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Media Publikasi Peraturan Perundang- Undangan dan Informasi Hukum.

Hannah Timmins, *Opsi Legal Perlindungan Hutan Pada Lahan Zona Pertanian Di Indonesia*, 2017 <https://www.earthworm.org/uploads/files/OPSI-LEGAL-PERLINDUNGAN-HUTAN-IN-INDONESIA-PADA-LAHAN-ZONA.pdf>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 2014-2023*, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Lampung, http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/public/RPHJP/RPHJP_BATU_TEGI.pdf

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Menanam Pohon untuk Mengatasi Pemanasan Global*, Knowledge Center Perubahan Iklim, <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/aksi/mitigasi/implementasi/330-menanam-pohon-untuk-mengatasi-pemanasan-global>

Luca., Tacconi, Krystof Obidzinski, Ferdinandus Agung, *Proses Pembelajaran (Learning Lessons) Promosi Sertifikasi Hutan dan Pengendalian Penebangan Liar di Indonesia*, Center for International Forestry Research (CIFOR), 2003, https://www.cifor.org/publications/pdf_files/books/btacconi0402.pdf

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial*,” Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663, 2016, https://www.forda-mof.org/files/P.83_2016.pdf.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Puslitbang Hutan Perkuat Kerjasama Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di KPHL Sikka NTT*,” Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, 2019. <https://www.forda-mof.org/berita/post/6232-puslitbang-hutan-perkuat-kerjasama-pengelolaan-hutan-berbasis-masyarakat-di-kphl-sikka-ntt>

Ruandha Agung, *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2018, [file:///C:/Users/Admin/Downloads/1548037882%20\(7\).pdf](file:///C:/Users/Admin/Downloads/1548037882%20(7).pdf)

Kuswardono T, Jan Pieter, *Pengetahuan Tradisional untukmenentukan Musim Tanam yang Berubah Studi kasus : Forum Iklim Lintas Aktor di 8 Desa di Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan Provinsi NTT*